

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 26 Juni dan 20 Juli 2023



TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang**
II. SIFAT RAPAT : Terbuka
III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
3. Skors (Penyusunan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi)
4. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Skors (untuk penyusunan jawaban bupati);

6. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPRIYADI EKO P. S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 8 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	: 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang

3. Fraksi Nasional Demokrat	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: - orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 2 orang
Jumlah	: 9 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat

- Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati

- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Badan, Dinas, Kantor Kabupaten Rembang

Mengawali rapat paripurna, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Senin tanggal 26 Juni 2023 kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Pertama DPRD dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2022, dengan agenda Penjelasan Bupati atas Raperda, Pandangan Umum Fraksi serta Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada bapak/ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini adalah tindak lanjut atas surat Bupati nomor : 900/3176/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berikut permohonan pembahasan, dan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 31 Mei 2023.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 30 orang.

Ketentuan kuorum pelaksanaan rapat paripurna ini, sebagaimana dituangkan pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa rapat paripurna untuk menetapkan perda dan APBD dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan ***“Bismillahirrohmanirrohim”*** tepat

pukul 13.05 WIB, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Tata Tertib DPRD, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
3. Skors (penyusunan pandangan umum fraksi);
4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Skors (penyusunan jawaban bupati);
6. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== PENJELASAN BUPATI =====

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Hadirin yang berbahagia.

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Dari penjelasan Bupati ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi-Fraksi dengan pandangan umumnya.

Untuk keperluan penyusunan pandangan umum fraksi, maka rapat paripurna saya skors selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada fraksi telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara keempat, yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan pandangan umum fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan : Sdr. Sumardi
Pembangunan
2. Fraksi Partai : Supadi
Kebangkitan Bangsa
3. Fraksi Nasional : Sdr. Khamid, S.E.,Sy.
Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Donny Kurniawan, S.E.,M.M.
5. Fraksi Demokrat : Sdr. H. Gunasih, S.E.
Hanura
6. Fraksi Karya Indonesia : Sdr. Agus Sutrisno
Sejahtera

Secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI =====

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianannya.

➤ *(Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari pandangan umum fraksi-fraksi ini, selanjutnya perlu ditanggapi oleh Saudara Bupati dengan jawabannya.

Namun sebelumnya perlu diberikan waktu, dan rapat paripurna saya skors kembali selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara ke enam yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== JAWABAN BUPATI =====

➤ *(Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Terimakasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawaban dan tanggapannya terhadap pertanyaan dan permintaan penjelasan oleh masing-masing fraksi sebagaimana termuat dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, nantinya tidak hanya untuk menjustifikasi realisasi pendapatan, belanja dan SILPA yang telah diaudit oleh BPK, akan tetapi DPRD perlu melihat lebih jauh, apakah realisasi pendapatan daerah sudah diupayakan dengan maksimal, apakah belanja daerah sudah dilakukan secara efektif dan efisien serta sampai sejauhmana anggaran yang digunakan telah mampu mencapai target kinerja pembangunan daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Sebelum saya akhiri, pada tanggal 29 Juni 2023 umat Islam merayakan Hari Raya Idhul Adha 1444 Hijriyah, untuk itu kami pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan Selamat Hari Raya Idhul Adha 1444 Hijriyah, semoga momen Idhul Adha semakin mempererat tali persaudaraan dan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Amiin ya robbal alamiin.

Akhirnya, dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 15.05 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Sekian

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA II ,



H. SUPRIYADI EKO P., S. E

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO M, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : SENIN, 26 JUNI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID S.E. S.	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26
27	JASMANI	Anggota	27
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29
30	ADI PURWOTO	Anggota	30
31	SUMARSIH	Anggota	31
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34
35	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	35
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43
44	BASIRUN	Anggota	44
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

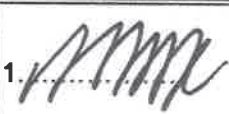
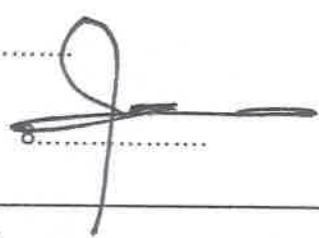


DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

.....

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : SENIN, 26 JUNI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	8. 



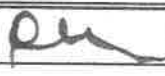
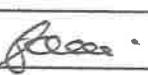
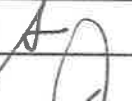
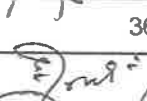
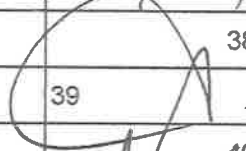
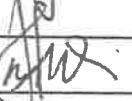
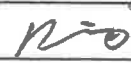
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : SENIN, 26 JUNI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	A. BERNI KENONG	SA	1
2	STAF AHLI BUPATI	STO/ TEGUH W.	SAHCI	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	ASISTEN I SEKDA	H. PRYKA SODAN	AKU 1	4
5	ASISTEN II SEKDA	MARSI	AS 2	5
6	ASISTEN III SEKDA	DWI BRYMI	AS 3	6
7	BAG. TATA PEMERINTAHAN	GUNARI	Ka.	7
8	BAG. HUKUM	Dedhy W	Ka	8
9	BAG. PROKOMPIMDA			9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	WISOTO.	Ka. Paj.	10
11	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	WISOTO.	PLT.	11
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dedhy W	PLH Ka	12
13	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	HERU SUFILO	KABAG	13
14	BAG. UMUM	Ans- S.W	keby.	14
15	BPPKAD			15
16	INSPEKTORAT	Imung Tri . W	Inspektur	16
17	BAPPEDA			17
18	DINSOSPPKB	PRAPCO. F	Ka.	18
19	B K D			19
20	B P B D	Anjan	Ka	20
21	DPU TATA RUANG	Maryam	pt. kordin	21
22	DPKP/ DINPERKIM	Mustain	Ka.	22
23	DINAS KESEHATAN	Dermoko .		23
24	DINDIKPORA	SUTRISNO		24
25	DINDAGKOP & UMKM			25
26	DINDUS & NAKER	Dari Mantojo	Kaden	26
27	DINTANPAN	AGUS IWAN H	Kadi.	27
28	DINLUTKAN	CHOLID.	Kadin	28
29	DINKOMINFO	Ganfaru	—	29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Drupodo		30
31	DINAS DUKCAPIL			31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINPERMADES	Slamet Haryo	Kepala	32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	MUTASIMU	Bagian	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A. Rami Amara	Pdt	34 
35	BADAN KESBANGPOLINMAS	Pur Purwato	Ka Ban	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	A. Sholchan		36 
37	DINAS PMPTSP	SDI TEGUH WI	PLT. KADIN	37 
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	PURWANTO	Pram	38 
39	SATPOL PP	Subotro		39 
40	Bag. Pjs-	Budi yono	Kabag	40 
41	G. Pura	Ard.		41 
42	Kedro CB PM	Masruki		42 
43	Lingkar Jaring	Pondy		43 
44	Bagian Prokopinda	BORWIE	sub. ko. kon dan dan	44 
45	Vicky Lingkar TV	VICKY	wartum	45 
46	Deny Budriw BPPKAD	Deny Budriw	Korubbid	46 
47	BPPKAD	Isminarto	kabid	47 
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



NUR PURNOMO M. S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : SENIN, 26 JUNI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Bambang S	1
2	CAMAT KALIORI	ABDUL KOLIK	2
3	CAMAT SUMBER	Has Subena	3
4	CAMAT SULANG	Maruli Dwi Panto	4
5	CAMAT BULU	Mr ARIF	5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM	KALIM	7
8	CAMAT SALE	MOH. IMAN	8
9	CAMAT LASEM	SLITAR WI	9
10	CAMAT PANCUR	KARTIMAN	10
11	CAMAT SEDAN	Ishmus LK	11
12	CAMAT SLUKE	ANUNG. A. H	12
13	CAMAT KRAGAN	Nandito Gestrin	13
14	CAMAT SARANG	Samien	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



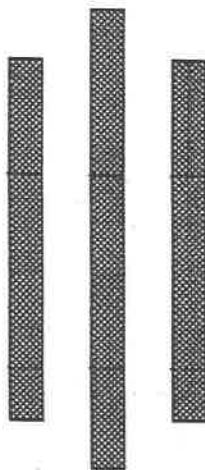
NUR PURNOMO M, S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

P E N G A N T A R
NOTA KEUANGAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 .

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dalam pasal 194 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan hal yang cukup membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang karena di penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 ini, kita berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.902.531.081.903,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.841.484.139.352,53 atau 96,79%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp2.232.003.097.935,00 direalisasikan Rp1.991.790.018.142,71 atau 89,24%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp383.340.384.032,00 realisasinya sebesar Rp182.737.177.231,56 atau 46,67% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp53.868.368.000,00 realisasinya sebesar Rp3.868.328.680,00 atau 7,18%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	PENDAPATAN - LRA			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA			
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	121.705.000.000,00	110.699.397.246,00	90,96
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	32.224.500.000,00	19.439.698.491,50	60,33
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19.250.000.000,00	12.702.367.621,00	65,99
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	200.991.627.000,00	210.253.318.024,03	104,61
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	374.171.127.000,00	353.094.781.382,53	94,37
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA			
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA			
10	Dana Perimbangan	1.119.761.984.383,00	1.088.099.353.211,00	97,17
11	Dana Instensif Daerah (DID)	8.578.224.000,00	8.578.224.000,00	100,00
12	Dana Desa	252.064.026.000,00	252.064.026.000,00	100,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.404.234.383,00	1.348.741.603.211,00	97,71
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA			
15	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	126.922.720.520,00	119.936.641.000,00	94,50
16	Bantuan Keuangan - LRA	19.033.000.000,00	16.611.141.659,00	87,28
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	145.955.720.520,00	136.547.782.659,00	93,55
18	Jumlah Pendapatan Transfer	1.526.359.954.903,00	1.485.289.385.870,00	97,31
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	2.000.000.000,00	3.099.972.100,00	155,00
20	Pendapatan Hibah - LRA	2.000.000.000,00	3.099.972.100,00	155,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.000.000.000,00	3.099.972.100,00	155,00
23	Jumlah Pendapatan	1.902.531.081.903,00	1.841.484.139.352,53	96,79
24	BELANJA DAERAH			
25	BELANJA OPERASI			
26	Belanja Pegawai	749.025.507.989,00	731.219.473.093,67	97,62
27	Belanja Barang dan Jasa	458.810.215.317,00	440.190.827.887,04	95,94
28	Belanja Bunga	637.071.026,00	387.850.732,00	60,88
29	Belanja Subsidi	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
30	Belanja Hibah	119.336.895.698,00	116.456.840.096,00	97,59
31	Belanja Bantuan Sosial	7.348.192.000,00	6.946.437.000,00	94,53
32	Jumlah Belanja Operasi	1.335.857.882.030,00	1.295.901.428.808,71	97,01

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
33	BELANJA MODAL			
34	Belanja Modal Tanah	126.927.300.000,00	25.043.309.520,00	19,73
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.953.437.695,00	88.311.359.739,00	95,01
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.978.822.157,00	66.587.369.416,00	96,53
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	187.005.916.608,00	97.159.204.555,00	51,96
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.361.164.445,00	3.171.958.434,00	94,37
39	Jumlah Belanja Modal	479.226.640.905,00	280.273.201.664,00	58,48
40	BELANJA TAK TERDUGA			
41	Belanja Tak Terduga	3.208.320.000,00	2.162.132.670,00	67,39
42	Jumlah Belanja Tak Terduga	3.208.320.000,00	2.162.132.670,00	67,39
43	BELANJA TRANSFER			
44	Belanja Bagi Hasil	10.391.229.000,00	10.391.229.000,00	100,00
45	Belanja Bantuan Keuangan	403.319.026.000,00	403.062.026.000,00	99,94
46	Jumlah Belanja Transfer	413.710.255.000,00	413.453.255.000,00	99,94
47	Jumlah Belanja Daerah	2.232.003.097.935,00	1.991.790.018.142,71	89,24
48	SURPLUS / (DEFISIT)	(329.472.016.032,00)	(150.305.878.790,18)	45,62
49	PEMBIAYAAN			
50	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
51	Penggunaan SiLPA	133.340.384.032,00	133.340.384.031,56	100,00
52	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	49.396.793.200,00	24,70
53	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	50.000.000.000,00	0,00	0,00
54	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	383.340.384.032,00	182.737.177.231,56	47,67
55	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
56	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
57	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
58	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	53.868.368.000,00	3.868.328.680,00	7,18
59	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	53.868.368.000,00	3.868.328.680,00	7,18
60	PEMBIAYAAN NETTO	329.472.016.032,00	178.868.848.551,56	54,29
61	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	28.562.969.761,38	0,00

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang

semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tahun depan kita dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

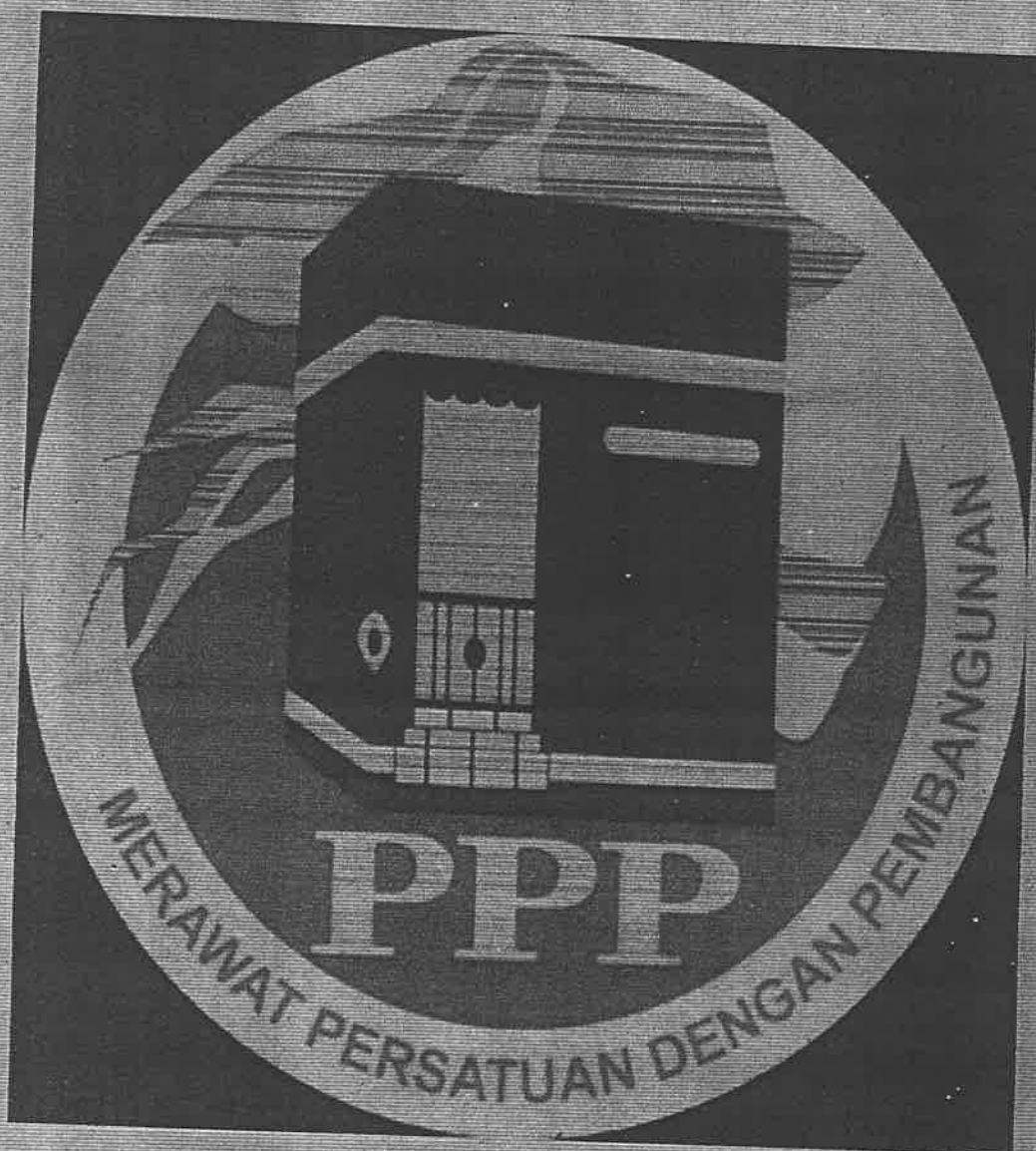
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan serta kesehatan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI	: SENIN
TANGGAL	: 26 JUNI 2023
DI BACAKAN OLEH	: SUNARDI, SPd. I.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

Senin , 26 Juni 2023

Dibacakan oleh : H. SUNARDI , SPdi

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forkopimda Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Staf Ahli , Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan , Kepala Dinas , dan
para Camat di lingkungan Kab. Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf , Dan Semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI , atas limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita , sehingga sampai saat ini , kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang baik ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan ucapan “ Selamat menunaikan ibadah haji “ kepada seluruh para Jama'ah haji , terutama dari Indonesia dan lebih utamanya kepada saudara kita yang dari warga Rembang , semoga selalu diberikan kesehatan , dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah haji dengan mudah dan lancar , baik dari rukun haji , wajib dan sunah-sunah haji dengan sempurna , dan semoga semua amal ibadahnya mendapat ridlo ALLAH SWT , dan nanti pulang kembali ke keluarga dalam keadaan selamat dan tetap sehat , serta menjadi haji yang Mabruk Mabruroh ... Amiin.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2022 , yang Nota Keuangannya telah disampaikan paparannya oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna i , beberapa menit yang baru lalu , pada hari ini Senin tanggal 26 Juni 2023.

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , yang telah bekerja keras , sehingga dari hasil Pemeriksaan audit BPK Nomor : 49A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 , Tanggal 10 Mei 2023 , atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 , berhasil mendapatkan predikat Opini WTP yang ke lima kalinya .

Namun demikian kita menyadari bahwa , di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 , masih ada beberapa hal yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat , karena masih ada pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang belum bisa terselesaikan , terutama pada infra struktur sarana jalan , sehingga capaian progress Realisasi Anggaran APBD tahun 2022 hanya 89,24 % , hasil capaian ini menurun cukup besar, bila dibandingkan dengan serapan pelaksanaan APBD tahun 2021 , yaitu progress realisasi capaiannya sebesar 96,28 % .

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , tetap selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada pihak Eksekutif , dengan harapan agar untuk capaian realisasi pelaksanaan APBD di tahun berjalan ini , dapat meningkat lebih baik lagi , supaya apa yang menjadi tujuan kita bersama , dan harapan masyarakat Rembang terpenuhi.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati...,

Setelah kami mencermati Paparan dan Penjelasan sdr. Bupati , dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK , atas Pemeriksaan Keuangan dan Systeem Pengendalian Interen dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan , yang disajikan dalam Laporan BPK Nomor : 49.B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 , Tanggal 10 Mei 2023. Terkait dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan beberapa catatan dari Resume Temuan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan realisasi pos PAD Tahun Anggaran 2022 , dalam perencanaan dianggarkan sebesar Rp. 374.171.127.000,00 , ternyata dalam realisasi hanya sebesar Rp. 353.094.781.382,53 , atau target PAD hanya tercapai 94,37 % , bila dibandingkan dengan tahun 2021 , realisasi PAD dapat surplus mencapai 114,33 % , atau sebesar Rp. 404.100.646.579,46 . Sehubungan hal tersebut , Kami Fraksi PPP mohon , agar Pemkab Rembang berupaya meningkatkan strategi , agar PAD Rembang kedepan bisa ditingkatkan lebih baik lagi.
2. TAPD dalam mengusulkan APBD harus memperhatikan prioritas belanja dan Capaian realisasi pendapatan , sehingga apabila terjadi devisa APBD , masih dalam batas Kapasitas fical daerah.
3. Di dalam Resume hasil pemeriksaan BPK atas system Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Laporan Keuangan , terdapat temuan kelemahan-kelemahan , dan BPK memberikan Rekomendasi sebanyak 9 (Sembilan) item untuk 12 OPD .

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar temuan dan Rekomendasi **BPK tersebut segera ditindaklanjuti.**

4. Terkait dengan hal-hal tersebut diatas , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta, agar semua kelemahan yang ada , kedepan harus dapat diperbaiki untuk lebih baik lagi , demi kemajuan Rembang Tercinta.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2022, dan selanjutnya untuk dilakukan pendalaman dan pembahasan oleh Komisi bersama OPD dan dengan Bantuan Tenaga Ahli , Banggar dan TAPD.

Ahirnya mari kita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga upaya dan usaha kita, ~~mandapatkan hasil maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Rembang.~~

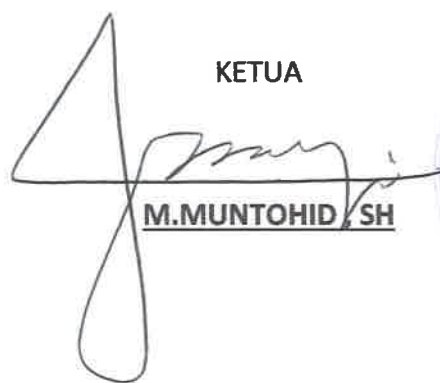
Trima kasih atas segala perhatiannya , dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq wal hiidayah ..., Wallahul muafiq ilaa aqwamithotiiq

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh....

Rembang , 26 Juni 2023

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

		
KETUA		SEKRETARIS
<u>M.MUNTOHID, SH</u>		<u>H. SUNARDI SPdi</u>



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan oleh: H. Supadi
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Senin, 26 Juni 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,,

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang Kami hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD beserta segenap anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang Kami hormati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajarannya.

Yang Kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang.

Yang Kami hormati Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Rembang beserta staff.

Yang Kami hormati para Camat sekabupaten Rembang.

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang atas Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung "Muhammad SAW" yang selalu kita tunggu syafaatnya besok yaumul qiyamah. Amin Allah humma Amiin.

Selanjutnya Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengucapkan selamat idul adha 1444 H dan selamat menunaikan ibadah haji kepada para jamaah Haji Kabupaten Rembang yang saat ini sudah berada di tanah suci Makkah Al Mukarramah teriring do'a semoga para jamaah selalu dalam kesehatan dan kelancaran dalam menjalankah ibadahnya serta dianugrahi oleh Allah SWT haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni-Nya.

Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,

Berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor 005/ 415/ 2023 tentang Pandangan Umum fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah menerima Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran beserta Pengantar Nota Keuangan LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Setelah kami mempelajari secara seksama, maka Kami Fraksi PKB akan menyampaikan pandangan umum kami secara Obyektif yang berisi catatan kajian kritis serta masukan terkait Realisasi Anggaran Tahun 2022. Adapun catatan,

masuk dan saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) adalah sebagai berikut;

1. Kami Fraksi PKB mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun kami juga prihatin karena berdasarkan LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 kita dapat menemukan adanya permasalahan-permasalahan pada APBD 2022 baik dari sisi strategi perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang disampaikan oleh Bupati, dalam hal kami perencanaan APBD tahun 2022 belum dilakukan secara terukur dan akurat yang dapat kita lihat dari belum tercapainya target Pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan Transfer.
 - a. Pendapatan Asli daerah dianggarkan Pada APBD 2022 sebesar Rp. 374.171.127.000,- (*tiga ratus tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 353.094.781.382,- (*tiga ratus lima puluh tiga milyar Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) atau selisih kurang Rp. 21.076.345.618,- (*Dua puluh satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian **di antaranya** sebagaimana berikut :
 - Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan Rp. 121.705.000.000,- (*seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima juta ribu rupiah*) terealisasi Rp. 110.699.397.246,- (*seratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) selisih kurang Rp. 11.005.602.754 (*sebelas milyar lima juta enam ratus dua ribu rupiah*)

➤ Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan RP. 32.224.500.000,- (*tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) terealisasi Rp. 19.499.698.491,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) selisih kurang Rp. 12.724.801.509,- (*dua belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah*)

Dari realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi Daerah yang mengalami selisih kurang dari yang dianggarkan sebesar Rp. 23.730.404.263,- (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat ribu rupiah*). Kalau kita melihat pada realisasi pendapatan APBD 2021 dari Pajak Daerah sebesar Rp. 109.959.371.761,- (*seratus sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 16.897.287.733,- (*enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) maka kita akan melihat bahwa di APBD 2021 dianggarkan kenaikan pendapatan dari kedua sumber ini pada APBD 2022 sebesar Rp. 27.072.840.506,- (*dua puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) kami mempertanyakan apa yang membuat Pemkab Rembang yakin untuk memproyeksikan kenaikan pendapatan sebesar ini dari kedua sumber ini? apakah hal ini disebabkan oleh kesalahan dan kesembronoan Pemkab dalam menganalisa potensi pendapatan yang berasal dari kedua sumber ini? atau karena kurang optimalnya kinerja Pemkab dalam meningkatkan pendapatan dari kedua sektor ini. Karena dalam pandangan kami, kondisi perekonomian dan social masyarakat sudah normal pada tahun 2022 pasca covid 2019.

b. Pendapatan Transfer pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.526.359.954.903,- (*satu triliun lima ratus dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) terealisasi Rp. 1.485.289.385.870,- (*satu triliun empat ratus delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) (97,31%) terjadi selisih kurang Rp. 41.070.569.033,- (*empat puluh satu milyar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) (2,69%). Adapun Pendapatan Transfer pada APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.425.568.719.763,- (*satu triliun empat ratus dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah*) terealisasi Rp. 1.436.076.389.264,- (*satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) (100,74%) terdapat kenaikan capaian dari target sebesar Rp. 10.507.669.501,- (*sepuluh milyar lima ratus tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) (0,74%). Yang menjadi tanda Tanya kami, mengapa realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 mengalami kenaikan capaian dari target, sementara pada tahun 2022 justru terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar kurang lebih 41 M? situasi dan kondisi apa yang membedakannya?

3. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, meski dalam LRA TA 2022 menyajikan Silpa Sebesar Rp. 28.562.969.761,- (*dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) namun pada neraca tersaji utang belanja sebesar Rp. 41.988.079.667,- (*empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*). Nilai tersebut merupakan tagihan pihak ketiga atau

kewajiban pada pihak ketiga atas kegiatan belanja TA 2022 dan kewajiban tahun-tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sampai tanggal 31 desember 2022. Adapun dari Silpa sebesar Rp 28,5 M tersebut yang dikuasai per 31 Desember 2022 di RKUD sebesar Rp. 15.236.071.421,- (*lima belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan selebihnya adalah kas yang sudah dibatasi penggunaannya. Sehingga dalam hitungan kami apabila silpa yang dikuasai di RKUD digunakan untuk membayar utang belanja, maka sejatinya pada LRA TA 2022 terjadi Silpa minus atau devisit Rp. 26.752.008.246,- (*Dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ribu rupiah*)

4. Permasalahan silpa yang dikuasai di RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.236.071.421,- (*lima belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang sebenarnya apabila digunakan untuk membayar kewajiban utang justru terjadi Silpa minus atau devisit Rp. 26.752.008.246,- (*dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ribu rupiah*) berdampak pada realisasi APBD 2023 mengingat pada APBD 2023, silpa 2022 tersebut dianggarkan sebagai sumber pembiayaan sebesar kurang lebih 171 M. Hal ini berdampak pada kepastian terjadinya Devisit pada APBD 2023. Selain itu, kekosongan Kas di RKUD juga menyebabkan tersendatnya realisasi APBD. Situasi dan kondisi ini tentu membutuhkan langkah-langkah dan solusi kongkrit dari Pemkab agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Kami sangat prihatin mendengarkan keluhan kesah pihak ketiga yang menjadi mitra Pemkab dalam mengerjakan proyek atau kegiatan APBD 2023, kegiatan atau proyeknya sudah dikerjakan berbulan-bulan tapi sampai saat ini belum terbayar. Begitu juga dengan masyarakat penerima bantuan yang sudah mengurus pencairan namun sampai saat ini belum ada kejelasan kapan bantuannya bisa dicairkan. Kami juga sangat prihatin ketika kami membaca di satu media surat kabar yang memuat berita dengan tagline “Pengelolaan APBD kab. Rembang yang **Carut Marut**”, berita sampah yang menumpuk

di sejumlah titik di Kabupaten Rembang karena layanan macet yang diakibatkan Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang tidak tersedia BBM nya, berita kertas Cetak E-KTP yang habis dan lain-lain.

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,

Demikian pandangan umum Fraksi PKB ini kami sampaikan dan dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmannirrohim**” Kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **MENYETUJUI** Raperda tentang pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun 2022 untuk dibahas pada tahapan pembahasan berikutnya.

Akhirul kalam Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 26 Juni 2023
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG



Nasirudin, S.Si
Ketua



Ilyas
Sekretaris



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Staf Ahli Bupati Rembang;

Yth. Asisten I, II, dan III Sekda Rembang;

Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se-Kabupaten Rembang;

Yth. Camat se-Kabupaten Rembang;

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian **"Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022"** dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Kami telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang karena dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya. Untuk kemajuan Kabupaten Rembang, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, ditemukan kelebihan pembayaran tunjangan anak pada 25 OPD sebesar RP. 174.588.567,00. Mohon kedepan untuk cermat dalam penganggaran dalam hal ini agar kedepan tidak terjadi kembali dan segera proses kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

2. Mengenai pelaksanaan Anggaran dan Manajemen Kas yang tidak optimal, maka TAPD kami mohon nanti kedepan dalam menyusun APBD untuk memperhatikan prioritas belanja dan capaian realisasi pendapatan sehingga apabila terjadi defisit APBD masih dalam batas kapasitas fiskal daerah. Defisit APBD 2022 melebihi ambang batas, dari selisih anggaran pendapatan dan belanja dapat diketahui bahwa nilai anggaran defisit adalah sebesar Rp. 329.472.016.032,00 atau 17,32% dari perkiraan pendapatan daerah. Nilai defisit tersebut jauh melampaui batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu 4,4% untuk kategori Kabupaten/Kota dengan kemampuan fiskal rendah.

Kabupaten Rembang merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah dengan nilai indeks 1,502 berdasarkan PMK Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Apabila digunakan nilai realisasi pendapatan yaitu 8,16%, persentase defisit APBD TA 2022 Kabupaten Rembang masih lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan, sehingga sangat berisiko terhadap keseimbangan fiskal.

Selain itu, BUD juga menggunakan DAU dan DAK sebesar Rp. 17.179.111.155,00 yang tidak terserap pada belanja TA 2022 untuk membiayai kegiatan belanja lainnya. DAU dan DAK tersebut dianggarkan untuk membiayai 12 paket pekerjaan pada DPUTARU. Mohon untuk paket pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2022 untuk segera diselesaikan di Tahun 2023.

3. Melaksanakan dengan baik dan benar atas semua rencana aksi (action plan) rekomendasi BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 49B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023.
Sejauh mana action plan yang dilakukan? MOHON PENJELASAN

4. Perhitungan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada DPUTARU belum diverifikasi secara memadai yang mengakibatkan nilainya belum memiliki dasar pengakuan yang jelas. Menyikapi hal ini, mohon kepada Kepala DPUTARU selaku pengguna anggaran untuk melakukan perhitungan *progress* pekerjaan sesuai kondisi lapangan sebagai dasar pengakuan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan atas paket pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian dan putus kontrak, yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat dan hasilnya untuk disampaikan kepada stakeholder yang terkait.
5. Pembangunan di Kabupaten Rembang kedepannya harus berjalan lebih baik lagi, terutama dalam membangun fasilitas publik seperti jalan. Maka untuk itu perlu melakukan optimalisasi anggaran pembangunan jalan agar kondisi jalan yang sudah lama rusak atau berlubang segera teratasi.

Demikian Pandangan Umum ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 26 Juni 2023

**KETUA
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



H. MASHADI, S.Pd., M.M.



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
PENJELASAN BUPATI TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
SENIN, 26 JUNI 2023**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
PENJELASAN BUPATI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Ka Dinas/Badan , Ka Kantor/Instansi dan Camat se- Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Pimpinan Rapat beserta unsur pimpinan Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi hari ini.
2. Saudara Bupati, yang sebelumnya telah menyampaikan penjelasan Rancangan peraturan daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kami Fraksi PDI Perjuangan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati beserta jajarannya yang telah menyusun dan menyampaikan Raperda tersebut. Kita bersama mengetahui Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK, dimana didalamnya berisikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2022.

Menanggapi Rancangan Peraturan Daerah tersebut, kami fraksi PDI Perjuangan ingin memberikan beberapa catatan :

- Yang Pertama, Kami mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang atas kerja keras yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2022, sehingga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kembali memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke lima kalinya atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2022.

- Yang Kedua, mengenai pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang tercapai sebesar 94,37 %, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terus menggali sumber pendapatan alternatif lainnya secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien, untuk mencapai serta memaksimalkan upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang akan datang. Sehingga kinerja OPD yang diberikan tugas untuk menerima Pendapatan Asli Daerah dapat lebih dioptimalkan lagi.
- Yang Ketiga, dalam laporan realisasi anggaran terkait dengan realisasi penyerapan anggaran Belanja, kami melihat Pemerintah Kabupaten Rembang belum mengoptimalkan kinerja OPD untuk segera melaksanakan kegiatan sebagaimana Rencana kerja OPD, sehingga tidak terjadi keterlambatan-keterlambatan pelaksanaan kegiatan OPD yang dapat merugikan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar dapat lebih proporsional dimasa mendatang serta dapat diserap dengan baik.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan untuk kita semua. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, SENIN 26 JUNI 2023

DIBACAKAN OLEH :**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

SENIN, 26 JUNI 2023

DIBACAKAN OLEH : .

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang Terhormat,

Saudara Sekertaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/ Bagian serta Camat Se Kabupaten Rembang.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat Hanura Tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2022 ini kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna pada siang hari ini. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi kinerja dari Pemda Kabupaten Rembang yang telah berusaha lebih baik dan lebih maju dalam menjalankan roda Pemerintahan, memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Namun ada beberapa hal yang mendasar justru diabaikan yaitu permendagri No 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Permendagri ini telah mengatur detail dan teknis sekali tetapi di APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 ini masih banyak yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan Terpentak pontalnya kegiatan di kabupaten Rembang. Misalnya masih banyak kegiatan yang seharusnya di anggarkan semuanya di induk akan tetapi masih juga sebagian di perubahan, sehingga berat di perubahan. Banyak kegiatan – kegiatan yang tidak sesuai atau melenceng dari Mandatory nya

Bupati, Wakil Bupati dan rapat Dewan yang kami hormati,

pada intinya kami melihat baik tidaknya Kualitas APBD Kabupaten Rembang dimulai dari perencanaannya mulai Bulan desember 2020 Sampai November 2021. Mulai Dari Musrembangdes sampai dengan penetapan APBD ini hampir setahun. Bagaimana mau berkualitas? Kami DPRD hanya sebagian waktu pembahasan di komisi hanya 3 hari, anggaran hanya 2 hari, dari anggaran hampir 2T. Ini di karenakan pengiriman dokumen selalu sangat terlambat. Sehingga jangan salahkan kalau jauh dari kualitas.

Di tahun 2022 ini kami sangat prihatin sekali Dengan kondisi pelaksanaan kegiatan fisik atau belanja modal masih dilaksanakan di akhir tahun sehingga banyak pekerjaan fisik yang dikerjakan terburu – buru dan jauh dari kualitas bahkan masih banyaknya kegiatan pembangunan jalan tidak selesai sampai dengan akhir tahun. ini siapa yang salah?

Pinjaman Daerah yang sudah ditetapkan 200 Miliyard untuk pengadaan tanah jalan lingkar dan Embung Kaliombo serta untuk pembangunan jalan tidak jadi diambil semua hanya 49 Miliyard saja. Sedangkan yang 41 miliyard di

Anggaran di 2023 ini. Yang jadi pertanyaan kami apakah bisa pembayaran pinjaman daerah melebihi masa jabatan bupati?

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Dewan yang kami hormati,

kami Fraksi Demokrat Hanura juga Menyoroti terkait pelaksanaan Program – program yang Perlu di dukung dengan SDM yang Kompeten, penerapan system MERITOKRASI dalam management PNS sudah sepatutnya di laksanakan agar penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya.sesuai dengan amanat PP No 11 Tahun 2017 berserta perubahannya PP no 17 Tahun 2020 Tentang Management PNS.sudah saatnya kabupaten Rembang menghitung Index married system agar dapat menjalankan tupoksi dengan baik.

Bupati, wakil Bupati dan Rapat Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami mengakhiri penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini kami yang pertama menyoroti terkait sajian Nota Pengantar Bupati ini disebutkan sebagai kewajiban pemerintah daerah sesuai peraturan pemerintah No 12 tahun 2020. padahal PP itu tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus. Yang seharusnya PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Yang ke dua kami menanyakan angka SILPA yang 28M itu SILPA dari mana saja Dan yang murni SILPA dari DAU murni berapa? Karena ini nantinya sebagai rujukan untuk APBD 2023. Angka ini benar benar sangat kecil sekali di konfersikan dengan penepatan SILPA di Anggaran Tahun 2023 yang sebesar 171 Miliard dengan demikian Tahun 2023 ini Sudah pasti akan sangat berat sehingga pemerintah Kabupaten Rembang Segera mengambil langkah Cepat supaya pelaksanaan APBD dapat berjalan dengan lancar.

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat – Hanuraini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan Terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat Bangsa dan Negara. Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Rembang, 26 JUNI 2023

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA



MUGIARTO S.T

SEKRETARIS



DUMADIYONO, S.H.



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

Penjelasan Bupati tentang Rancangan Perda
Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Senin, 26 Juni 2023
Juru Bicara: **AGUS SUTRISNO**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Staf Ahli Bupati Rembang
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumil Akhir nanti.

Perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444H yang akan diperingati pada tanggal 29 Juni 2023. Hari Raya Idul Adha mengajarkan umat muslim untuk melakukan pengorbanan dengan ikhlas melalui hewan kurban. Hal ini seperti yang

diajarkan Nabi Ibrahim ketika diharuskan menyembelih anaknya, Nabi Ismail oleh Allah SWT.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Mendengar penjelasan tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sdr. Bupati.

Fraksi KIS sangat mengapresiasi atas segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab dalam meningkatkan laju pembangunan .

Pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik. Daya beli mulai merangkak naik. Pasar mulai ramai. Para bakul dan pembeli terlihat sumringah. Menandakan kehidupan tampak mulai normal kembali. Ini hasil yang harus disyukuri dan harus terus ditingkatkan.

Namun demikian, Terdapat beberapa hal yang kami mintakan penjelasan dan harapan kepada pemerintah antara lain :

1. Berdasarkan penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 dituliskan bahwa Silpa APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 28,562 M. Sementara didalam Perda APBD Tahun Anggaran 2023 ini Silpa Tahun sebelumnya (2022) diperkirakan sebesar 171,995 M. Dengan melihat kondisi tersebut bagaimana Pemkab Rembang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang agar bisa berjalan stabil, mengingat estimasi Silpa Tahun sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan?.

Apa yang akan dilakukan Pemkab Rembang dalam menyikapi hal tersebut?

Mohon Penjelasan!

2. Realisasi PAD sebesar 353,094 M atau sebesar 94,37 % dari target sebesar 374,171 M menurut kami sangatlah kurang memuaskan. Hal apa saja yang menyebabkan PAD tidak tercapai?

Menurut kami komponen dari PAD yang terpenuhi dan capaiannya memuaskan cuma lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar 104 %.

Sementara untuk Pendapatan Pajak Daerah cuma tercapai 90,96 %.

Yang paling mengecewakan adalah Pendapatan Retribusi Daerah cuma tercapai 60,33 % dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan cuma tercapai 65,99 %.

Kira-kira apa yang menyebabkan target tersebut tidak tercapai?.

Apa langkah Pemerintah Daerah agar kedepan tidak terulang kembali?.

Mohon penjelasan!

3. Terkait Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan hasil capaiannya juga mengecewakan, yaitu diangka 51,96 % dari total rencana belanja sebesar 187 M yang cuma terealisasi sebesar 97,159 M, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

itu artinya Pemerintah belum berhasil didalam melaksanakan kegiatan yang telah tertuang didalam Perda APBD secara baik dan benar. Kami meminta persoalan-persoalan teknis yang terjadi seminimal mungkin harus diantisipasi agar kedepan kejadian ini tidak terulang kembali. Kami meminta untuk perencanaan fisik bisa tetap

dianggarkan T - 1 , supaya Pekerjaan Fisik bisa dilaksanakan lelang diawal tahun, minimal di triwulan 2 sudah bisa terlaksana. Kami juga meminta sebisa mungkin Pekerjaan Fisik bisa diselesaikan maksimal di Triwulan ke 3, karena selain cuaca yang sangat mendukung juga apabila ada keterlambatan pekerjaan fisik masih ada waktu untuk menyelesaikannya ditahun yang sama yaitu di triwulan ke 4.

4. Terkait Belanja Modal Tanah yang realisasinya sebesar 19,73 %, dimana rencana pembebasan lahan jalan lingkaran Rembang Lasem yang tidak terealisasi.

Kami menyoroti tentang pembebasan lahan embung Kaliombo yang telah dianggarkan sebesar 20 M. Sementara informasi yang kami terima bahwa pembebasan Embung Kaliombo belum *clear*, yang artinya masih ada kekurangan anggaran sebesar 12 M. Sementara anggaran dari Pusat telah di rencanakan pembangunan embung Kaliombo akan dilaksanakan setelah pembebasan lahan tuntas. Bagaimana langkah Pemerintah Daerah untuk bisa memenuhi anggaran tersebut? Kapan pembanguana fisik embung Kaliombo akan dimulai?

Kami tidak mau bahwa kejadian ditahun sebelumnya terulang kembali, yaitu Pembangunan Embung Kaliombo gagal dilaksanakan karena tanahnya belum terbebaskan padahal anggaran dari pemerintah pusat sudah tersedia. Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua.

5. Terkait pinjaman daerah, dalam perencanaan tercatat 200 M, terealisasi 49,3 M atau 24,7 % sampai akhir 2022. Ini adalah hasil yang kurang menggembirakan karena ada dana pinjaman yang mengendap atau tidak dipake sebesar 150,7 M. padahal ini adalah dana pinjaman yang ada beban pengembalian serta bunga. Mohon penjelasan serta langkah-langkah penyelesaiannya!
6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan bisa ikut menyumbang PAD terlihat belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan ada BUMD migas terlihat nyaris tutup padahal ada penyertaan modal didalamnya. Mohon penjelasan dan langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan diatas ?
7. Dana Insentif Daerah (DID) yang telah dicapai 8,56 M masih kurang optimal karena sebelumnya kita pernah mendapatkan 91 M. Hal2 apa saja yang sudah dilakukan agar DID bisa lebih baik , mohon penjelasan !

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup Pemandangan Umum ini mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja menunaikan semua amanah kita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,

Sekretaris,


WIWIN WINARTO, S.H.




AGUS SUTRISNO



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN REMBANG**



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Sdr Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forpimda Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr.Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr.Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr.Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur **Alhamdulillah** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka **“Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022”** dalam keadaan sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Bahwa kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan-catatan yang berkembang dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang, berikut saya sampaikan jawaban dan klarifikasinya:

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1.	Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, berhasil mendapatkan predikat Opini WTP yang ke lima kalinya	Terimakasih atas apresiasi yang diberikan (sekaligus menjawab apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan)
2.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tetap selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada pihak Eksekutif, dengan harapan agar untuk capaian realisasi pelaksanaan APBD di tahun berjalan ini, dapat meningkat lebih baik lagi, supaya apa yang menjadi tujuan kita bersama, dan harapan masyarakat Rembang terpenuhi.	Kami terima dan akan kami tindaklanjuti
3	Sehubungan dengan realisasi pos PAD Tahun Anggaran 2022, Kami Fraksi PPP mohon, agar Pemkab Rembang berupaya meningkatkan strategi, agar PAD Rembang kedepan bisa ditingkatkan lebih baik lagi.	Kami telah melakukan upaya penggalan potensi PAD khususnya Pajak Daerah diantaranya PBB dan Minerba karena 2 jenis pajak ini adalah salah satu penyumbang PAD terbesar di Pajak Daerah.
4	TAPD dalam mengusulkan APBD harus memperhatikan prioritas belanja dan Capaian realisasi pendapatan, sehingga apabila terjadi devisa APBD, masih dalam batas Kapasitas fiskal daerah	Terimakasih atas apresiasi yang diberikan
5	Di dalam Resume hasil pemeriksaan BPK atas sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Laporan Keuangan, terdapat temuan kelemahan-kelemahan, dan BPK memberikan Rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) item untuk 12 OPD	Kami terima dan telah kami tindaklanjuti serta telah dibahas dalam kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di BPK RI –Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 12 - 22 Juni 2023 (sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Nasdem)
6	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta, agar semua kelemahan yang ada , kedepan harus dapat diperbaiki untuk lebih baik lagi	Saran kami terima dan akan kami tindaklanjuti

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
1.	Perencanaan APBD tahun 2022 belum dilakukan secara terukur dan akurat yang dapat kita lihat dari belum tercapainya target Pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan Transfer	Perencanaan telah dilakukan secara terukur dan akurat akan tetapi pencapaiannya belum maksimal dikarenakan 1. BPHTB tidak ada transaksi yang besar seperti Tahun 2021 2. Tingkat hunian Hotel yang belum maksimal sehingga Pajak Hotel tidak terpenuhi 3. Regulasi perijinan kapal berlayar yang berubah sehingga menurunnya retribusi pelelangan ikan 4. Penerimaan Pendapatan Transfer didasarkan penyerapan tahun sebelumnya (sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Karya Indonesia Sejahtera)
2.	Permasalahan silpa yang dikuasai di RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.236.071.421,- yang sebenarnya apabila digunakan untuk membayar kewajiban utang belanja sebesar Rp. 41.988.079.667,- justru terjadi Silpa minus atau devisit Rp. 26.752.008.246,- Hal ini berdampak pada kepastian terjadinya Devisit pada APBD 2023, kekosongan Kas di RKUD juga menyebabkan tersendatnya realisasi APBD. Situasi dan kondisi ini tentu membutuhkan langkah-langkah dan solusi kongkrit dari Pemkab agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.	Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan antara lain: 1. Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan Seluruh Kepala OPD yang ditindaklanjuti dengan Rapat TAPD. 2. Rapat koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan untuk optimalisasi pencapaian pendapatan daerah TA. 2023 3. Dilakukan intensifikasi dan monitoring untuk percepatan pembayaran pajak dan retribusi daerah (sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Karya Indonesia Sejahtera)

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI NASDEM	
1.	Terkait pembayaran tunjangan anak pada 25 OPD sebesar RP. 174.588.567,00. Mohon kedepan untuk cermat dalam penganggaran dalam hal ini agar kedepan tidak terjadi kembali dan segera proses kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah.	Sudah ditindaklanjuti dengan setor ke kas daerah
2.	a. Mengenai pelaksanaan Anggaran dan Manajemen Kas yang tidak optimal, maka TAPD kami mohon nanti kedepan dalam menyusun APBD untuk memperhatikan prioritas belanja dan capaian realisasi pendapatan sehingga apabila terjadi defisit APBD masih dalam batas kapasitas fiskal daerah. b. BUD juga menggunakan DAU dan DAK sebesar Rp. 17.179.111.155,00 yang tidak terserap pada belanja TA 2022 untuk membiayai kegiatan belanja lainnya. DAU dan DAK tersebut dianggarkan untuk membiayai 12 paket pekerjaan pada DPUTARU. Mohon untuk paket pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2022 untuk segera diselesaikan di Tahun 2023.	a. Terimakasih akan kami tindaklanjuti. b. Kami sudah membuat surat pernyataan kesanggupan pemerintah kabupaten Rembang untuk menganggarkan kembali atas kewajiban kepada pihak ketiga di Perubahan APBD Tahun 2023
3.	Terkait perhitungan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada DPUTARU belum diverifikasi secara memadai	Berkaitan dengan perhitungan utang belanja telah dilakukan review oleh inspektorat.
4.	Pembangunan di Kabupaten Rembang kedepannya harus berjalan lebih baik lagi, terutama dalam membangun fasilitas publik seperti jalan. Maka untuk itu perlu melakukan optimalisasi anggaran pembangunan jalan agar kondisi jalan yang sudah lama rusak atau berlubang segera teratasi.	Terimakasih akan kami tindaklanjuti

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Terkait Pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang tercapai sebesar 94,37 %.	Kami telah melakukan inovasi diantaranya pemasangan alat-alat tapping box untuk restoran dan monitoring serta pendataan pada obyek-obyek pajak daerah baru.
2.	Pemerintah Kabupaten Rembang belum mengoptimalkan kinerja OPD-OPD nya untuk penyerapan anggaran.	Akan kami perhatikan dan tindaklanjuti sehingga kedepan anggaran terisap lebih baik.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI DEMOKRAT HANURA	
1.	Fraksi Demokrat Hanura sangat prihatin sekali Dengan kondisi perencanaan yang tidak berkualitas dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sangat tidak sinkron dengan perencanaan.	Dalam penyusunan perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 dan telah diimplementasikan dalam aplikasi SIPD sesuai permendagri no 70 tahun 2019 tentang SIPD
2.	Fraksi Demokrat Hanura menyoroti terkait Nota Pengantar Bupati yang tidak sama dengan setelah perubahan APBD 2022 yaitu pendapatan yang selisih 3M dan defisitnya. Mohon Penjelasannya	Nota Pengantar Bupati berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2022 Audited
3.	Fraksi Demokrat Hanura menanyakan angka SILPA yang 28M itu SILPA dari mana saja Dan yang murni SILPA dari DAU murni berapa?	DAK : Rp. 2.321.934.772,00 Banprov : Rp. 11.814.164.549,00 CSR Semen Gresik : Rp. 1.099.972 100,00 BLUD : Rp. 13.234.645.367,38 BOS : Rp. 92.252.973,00

NO.	PERTANYAAN	
	VI. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA	
1.	Terkait Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan hasil capaannya juga mengecewakan, yaitu diangka 51,96 % dari total rencana belanja sebesar 187 M yang cuma terealisasi sebesar 97,159 M, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?	Sampai dengan 31 Desember 2022 beberapa pekerjaan jalan belum selesai
2.	a. Terkait Belanja Modal Tanah yang realisasinya sebesar 19,73 %, dimana rencana pembebasan lahan jalan lingkår Rembang Lasem yang tidak terealisasi b. bahwa pembebasan Embung Kaliombo belum clear, yang artinya masih ada kekurangan anggaran sebesar 12 M.	a. Pembengkakan biaya pembebasan lahan sehingga anggaran tidak tercukupi b. Telah dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat terdampak yang belum menerima ganti kerugian, dan masyarakat terdampak yang belum menerima pembayaran ganti kerugian bersedia dan sepakat untuk dilakukan pembayaran tahap 2 di Tahun 2023
3.	Terkait pinjaman daerah, dalam perencanaan tercatat 200M terealisasi 49,3 M atau 24,7 % sampai akhir 2022. Ini adalah hasil yang kurang menggembirakan karena ada dana pinjaman yang mengendap atau tidak dipake sebesar 150,7 M, padahal ini adalah dana pinjaman yang ada beban pengembalian serta bunga. Mohon penjelasan serta langkah-langkah penyelesaiannya!	Pencairan Pinjaman diajukan sesuai dengan progres pekerjaan
4.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat ikut menyumbang PAD terlihat belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan ada BUMD migas terlihat nyaris tutup padahal ada penyertaan modal didalamnya. Mohon penjelasan dan langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan diatas ?	Disebabkan karena tidak beroperasinya sumur gas RGT#2 dikarenakan kondisi natura decline yang berakibat tidak produksi Langkah-langkah yang diamabil antara lain : mengaktifkan usaha lain aspal buton dan Solar Subsidi (menyarankan PT RME untuk membuat kajian manfaat penggunaan aspal buton)

Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat Kami jelaskan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis saya mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 26 Juni 2023

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juli 2023
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran atas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
3. Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
4. Persetujuan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

5. Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
6. Laporan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
7. Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
8. Persetujuan atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
9. Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
10. Penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan RTRW, dilanjutkan penyerahan SK DPRD;
11. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat : 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan : 6 orang

5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 8 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	: 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 2 orang
Jumlah	: 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang;

Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Camat se Kabupaten Rembang

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridho dan inayah-Nya, pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023 kita dapat hadir untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Kedua dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dengan keadaan sehat wal'afiat. Sebelum berlanjut ke acara rapat, bahwa hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 kemarin merupakan hari bersejarah bagi umat Islam, yang diperingati sebagai hari Tahun Baru Islam. Untuk itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriyah, semoga tahun ini menjadi lebih baik dari tahun lalu, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keimanan serta ketaqwaan yang baik. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Keabsahan kuorum rapat paripurna kedua ini sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama pada tanggal 26 Juni 2023 dalam membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna ini yaitu sebanyak 30 orang.

Dengan demikian, kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 14.25 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Juli 2023 dan undangan yang telah tersebar, setelah selesai pelaksanaan rapat paripurna kedua ini, akan diselenggarakan lagi rapat paripurna dengan agenda Persetujuan terhadap Raperda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043. Dengan pertimbangan ketentuan kuorum yang berlaku dalam pelaksanaannya adalah sama yaitu dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD, maka kami bermaksud menggabung pelaksanaan persetujuan Raperda tentang RTRW dalam acara rapat paripurna ini. Namun hal ini perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota terlebih dahulu. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah rapat paripurna dalam rangka persetujuan atas Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 pelaksanaannya digabung dalam acara rapat paripurna kedua ini dapat disetujui ?”

=====SETUJU=====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Atas persetujuan dari anggota, maka susunan acara rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran atas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
3. Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
4. Persetujuan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
6. Laporan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
7. Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
8. Persetujuan atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
9. Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
10. Penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan RTRW, dilanjutkan penyerahan SK DPRD;
11. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Laporan Badan Anggaran atas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Sdr. Nur Purnomo M, S.IP (Sekretaris Badan Anggaran) saya minta untuk menyampaikannya.

===== LAPORAN BANGGAR =====

Terimakasih Saudara Sdr. Nur Purnomo M, S.IP (Sekretaris Badan Anggaran) atas bantuannya.

➤ *(Laporan Badan Anggaran atas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Terlebih dahulu, kepada juru bicara yang mewakili fraksi saya minta untuk menunjukkan jari :

- 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sumardi
- 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
- 3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Sustiyono
- 4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo, S.H.
- 5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Agus Purnawan Y. A.Md.
- 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

Secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

PENDAPAT FRAKSI (PERTANGGUNGJAWABAN APBD)

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓		

Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampiannya.

➤ *(Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dari laporan Badan Anggaran maupun pendapat masing-masing Fraksi, sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Oleh karena persetujuan Raperda tergantung dari pengambilan keputusan anggota pada rapat parupurna, maka saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJU=====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara kelima yaitu Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Saudara Bupati waktu dan tempat disilahkan.

===== PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaianannya.

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keenam yaitu Laporan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

Kepada Ketua Pansus atau yang ditunjuk, disilahkan.

===== LAPORAN PANSUS RTRW =====

Terimakasih Saudara H. Gunasih, S.E. atas laporannya.

➤ *(Laporan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yag berbahagia,

Demikian telah kita dengar bersama, laporan Pansus atas hasil kerjanya dalam membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara ketujuh yaitu Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

Kepada yang ditunjuk, secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Sdr. Sumardi |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Sdr. Joko Suwito, S.H. |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : Sdr. Khamid, S.E.,Sy. |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : Sdr. Adi Purwoto |

5. Fraksi Demokrat Hanura

: Sdr. Mugiyarto,S.T.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: Sdr. Rabis Swabihantoro

PENDAPAT FRAKSI (RTRW)

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓		
Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓		

➤ *(Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Baik Pansus maupun Fraksi-Fraksi telah menyampaikan laporan dan pendapatnya terhadap Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pembicaraan Tingkat II bahwa, disetujui atau tidaknya Rancangan Perda adalah tergantung dari hasil pengambilan keputusan anggota dalam memberikan persetujuan.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus dapat disetujui ? “

=====SETUJU=====

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya, acara kesembilan yaitu Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

==== PENDAPAT AKHIR BUPATI (RTRW) ====

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043t terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Baik Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD maupun Raperda tentang RTRW Kabupaten Rembang telah mendapat persetujuan oleh anggota dalam dalam rapat paripurna ini. Atas hal tersebut, dan dengan memperhatikan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Rembang terhadap kedua Rancangan Perda tersebut. Untuk itu marilah kita ikuti acara terakhir yaitu Penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan RTRW, dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD.

Agar pelaksanaannya berjalan baik, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi.

Disilahkan.

**===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DAN PENYERAHAN SK DPRD =====**

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui, maka selesai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 16.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat ini.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO M, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN IV : Laporan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.
- LAMPIRAN V : Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.
- LAMPIRAN VI : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN VII : Pendapat Akhir Bupati atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Nomor⁶..... Tahun 2023 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- LAMPIRAN IX : Keputusan DPRD Nomor⁷..... Tahun 2023 Tentang Persetujuan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID S F Sv	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26	
27	JASMANI	Anggota	27	
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28	
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29	
30	ADI PURWOTO	Anggota	30	
31	SUMARSIH	Anggota	31	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32	
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33	
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34	
35	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	35	
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36	
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38	
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39	
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40	
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41	
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42	
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43	
44	BASIRUN	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

.....

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	8. 


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Bambang S	1
2	CAMAT KALIORI	A. Kibik	2
3	CAMAT SUMBER	Haz. Suben	3
4	CAMAT SULANG	Maruli Dwi R	4
5	CAMAT BULU	Nur Afif	5
6	CAMAT PAMOTAN	MUTTI AFFANDY	6
7	CAMAT GUNEM	KASTARI	7
8	CAMAT SALE	MOH. IMRON	8
9	CAMAT LASEM	SUTAR WI	9
10	CAMAT PANCUR	RIFAI	10
11	CAMAT SEDAN	Ishary Hs	11
12	CAMAT SLUKE	ANUNG. A. N	12
13	CAMAT KRAGAN	Agus R.	13
14	CAMAT SARANG	N. RUFUA	14



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO M, S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	A. Rudi Permana	Seher	2
3	STAF AHLI BUPATI	SIDI TEGUH W.	SAHKi	3
4	ASISTEN I SEKDA	A. H. H. Sidi	AS 1	4
5	ASISTEN II SEKDA	Mard-	AS 2	5
6	ASISTEN III SEKDA	Dwi Li	AS 3	6
7	BAG. TATA PEMERINTAHAN	GUNARY	Kabag.	7
8	BAG. HUKUM	Keta Val	Kabag	8
9	BAG. PROKOMPIMDA	ARIEF DWI S	Kabag	9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			10
11	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			11
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			12
13	BAG. ORGANISASI	HERI SUDI	KABAG	13
14	BAG. UMUM	Andi G.W.	Kabag	14
15	BPPKAD	Fery Suman	Ka	15
16	INSPEKTORAT	Imuhg Tri W	Inspektur	16
17	BAPPEDA	A. Patih IC	Setretaris	17
18	DINSOSPGBK	PRAPTO. A	Ka	18
19	B K D	Toni M		19
20	B P B D	Anja	Ka	20
21	DPU TATA RUANG	Maryasa	DPUTARU	21
22	DPKP/ DINPERKIM	Rini Anggr	Seher	22
23	DINAS KESEHATAN	Murni	Ka Bid. Yans	23
24	DINDIKPORA			24
25	DINDAGKOP & UMKM	ARIS SURYONO		25
26	DINDUS & NAKER	Cheri Poadyama	Seher	26
27	DINTANPAN	Dwi Ernawati	Subkoord.	27
28	DINLUTKAN	Cito Li D	Kadisa	28
29	DINKOMINFO			29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Dyana	Kadisa	30
31	DINAS DUKCAPIL	Sri Nurjanti	Seher	31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINPERMADES	Slamat Haryanti	Kepala	32 Reza
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Triana Husnu	Sekretaris	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pt. Kadi		34 Aan
35	BADAN KESBANGPOL	Rai Jora	Sekpan	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	A. Sholchan		36
37	DINAS PMPTSP	Siti Tesuh	Pt. Kabin	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	Fulidya	Kepala	39
40		Kundy	Lingket	40
41		Vachri	Puella Lander	41
42		Rio	Lingket	42 Rin
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


NUR PURNOMO M. S.I.P
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN ATAS RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMD S.E. S.	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26	
27	JASMANI	Anggota	27	
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28	
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29	
30	ADI PURWOTO	Anggota	30	
31	SUMARSIH	Anggota	31	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32	
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33	
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34	
35	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	35	
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36	
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38	
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39	
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40	
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41	
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42	
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43	
44	BASIRUN	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN ATAS RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekretaris Daerah	8. 


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN ATAS RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 13.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Bambang S	1
2	CAMAT KALIORI	A. Kurniadi	2
3	CAMAT SUMBER	Hadi Sugeng	3
4	CAMAT SULANG	Maruli Puri Ronisa	4
5	CAMAT BULU	Nur Afid	5
6	CAMAT PAMOTAN	MUFTI AFFANDI	6
7	CAMAT GUNEM	KASTARI	7
8	CAMAT SALE	MOH. IMRON	8
9	CAMAT LASEM	GUTARWI	9
10	CAMAT PANCUR	RIPAI	10
11	CAMAT SEDAN	Iskandar H	11
12	CAMAT SLUKE	ANURIG. A. N	12
13	CAMAT KRAGAN	Agus R.	13
14	CAMAT SARANG	NASATON R	14



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO M. S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN ATAS RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2023 - 2043

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 JULI 2023
PUKUL : 13.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	I. Budi Muna	Calon	2
3	STAF AHLI BUPATI	SIBI TEGUH W.	Staf	3
4	ASISTEN I SEKDA	El-Fauz Saen	Asst I	4
5	ASISTEN II SEKDA	Marga	As 2	5
6	ASISTEN III SEKDA	Dwi U	As 3	6
7	BAG. TATA PEMERINTAHAN	GUNARY	Kabag	7
8	BAG. HUKUM	Ket. Um	St. 6	8
9	BAG. PROKOMPIMDA			9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			10
11	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			11
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			12
13	BAG. ORGANISASI	Heru Susilo	Kasas	13
14	BAG. UMUM	Anr. SW	Kabag.	14
15	BPPKAD	Fery Sumardi	Ka	15
16	INSPEKTORAT	Imang fri	Inspektur	16
17	BAPPEDA	A. Rahhik	Sekretaris	17
18	DINSOSPPKB	PRAPTO.R	Ka	18
19	B K D	Tom M	Seberkani	19
20	B P B D	Myr	ka	20
21	DPU TATA RUANG	Maryasa	Asisten	21
22	DPKP/ DINPERKIM	Dwi Mung p	Seherin	22
23	DINAS KESEHATAN	Muslihah	Katrol Yaw	23
24	DINDIKPORA			24
25	DINDAGKOP & UMKM			25
26	DINDUS & NAKER	Chais Prasetyama	Sebetaris	26
27	DINTANPAN	Dwi Ernawati	Subkard	27
28	DINLUTKAN	Cito Li D	Kadarn	28
29	DINKOMINFO			29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Dyoko	Kadim	30
31	DINAS DUKCAPIL	Sri Nurganih	Sididri	31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINPERMADES	Shamet Haryanti	Kepala	32 pccc
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Triana Husnu	Sekretaris.	33 hr
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pet Kadi		34 pccc.
35	BADAN KESBANGPOL	Has'ori	Soldat	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	A-Scholchan		36
37	DINAS PMPTSP	Siti Iyul	M. Kadi	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	Ilisriyan	Kepala	39
40		Randy	Lingkar	40
41		Vachri	Radar kady	41
42		Ri	Lingkar TV	42 Rio
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



NUR PURNOMO M. S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002



LAPORAN BADAN ANGGARAN

DALAM RAPAT PARIPURNA

**PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
JULI 2023**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Bupati Nomor : 900/3176/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
13. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 31 Mei 2023 dan 13 Juli 2023 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

III. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Kabupaten Rembang dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023
Jam : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
2. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
3. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Kabupaten Rembang dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2023
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
4. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Kabupaten Rembang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juli 2023
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dapat kami laporkan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	APBD 2022 SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2022		REALISASI 2021
			JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.902.531.081.903,00	1.841.484.139.352,53		1.911.328.505.019,46
4.1	Pendapatan Asli Daerah	374.171.127.000,00	353.094.781.382,53	94,37	404.100.646.579,46
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	121.705.000.000,00	110.699.397.246	90,96	109.959.371.761,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	32.224.500.000,00	19.439.698.491,50	60,33	16.918.657.733,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.250.000.000,00	12.702.367.621	65,99	10.839.239.869,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.991.627.000,00	210.253.318.024,03	104,61	266.383.377.215,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.526.359.954.903,00	1.485.289.385.870	97,31	1.436.076.389.264,00
4.2.01	Dana Transfer Pemerintah Pusat	1.380.404.234.383,00	1.348.741.603.211	97,71	1.299.326.523.909,00
4.2.02	Dana Transfer antar Daerah	145.955.720.520,00	136.547.782.659	93,55	136.749.865.355,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.000.000.000,00	3.099.972.100	155,00	71.151.469.176,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	3.099.972.100	155,00	5.043.562.673,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan				66.107.906.503,00
5	BELANJA DAERAH	2.232.003.097.935,00	1.991.790.018.142,71	89,24	1.836.443.011.929,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.335.857.882.030,00	1.295.901.428.808,71	97,01	1.256.542.221.398,00
5.1.01	Belanja Pegawai	749.025.507.989,00	731.219.473.094	97,62	758.906.313.696,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.810.215.317,00	440.190.827.887	95,94	412.453.151.139,00
5.1.03	Belanja Bunga	637.071.026,00	387.850.732	60,88	511.986.048,00
5.1.04	Belanja Subsidi	700.000.000,00	700.000.000	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	119.336.895.698,00	116.456.840.096	97,59	83.081.370.515,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.348.192.000,00	6.946.437.000	94,53	1.589.400.000,00
5.2	Belanja Modal	479.226.640.905,00	280.273.201.664,00	58,48	187.286.320.101,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	126.927.300.000,00	25.043.309.520	19,73	1.223.010.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja	92.953.437.695,00	88.311.359.739	95,01	46.697.324.031,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.978.822.157,00	66.587.369.416	96,53	67.632.210.746,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	187.005.916.608,00	97.159.204.555	51,96	67.739.432.724,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.361.164.445,00	3.171.958.434	94,37	3.994.342.600,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.208.320.000,00	2.162.132.670	67,39	5.482.217.430,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.208.320.000,00	2.162.132.670	67,39	5.482.217.430,00
5.4	BELANJA TRANSFER	413.710.255.000,00	413.453.255.000,00	99,94	387.132.253.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.391.229.000,00	10.391.229.000	100,00	11.972.924.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	403.319.026.000,00	403.062.026.000	99,94	375.159.329.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(329.472.016.032,00)	(150.305.878.790,18)	45,62	74.885.493.090,46
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	383.340.384.032,00	182.737.177.231,56	47,67	75.734.487.673,10
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	133.340.384.032,00	133.340.384.031,56	100,00	65.325.181.073,10
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	49.396.793.200	24,70	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	50.000.000.000,00	-	0,00	10.409.306.600,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	53.868.368.000,00	3.868.328.680,00	7,18	17.279.596.732,00
6.2.03	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah				3.001.922.132,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	53.868.368.000,00	3.868.328.680	7,18	14.277.674.600,00
	PEMBIAYAAN NETTO	329.472.016.032,00	178.868.848.551,56	54,29	58.454.890.941,10
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		28.562.969.761,38	86,11	133.340.384.031,56

CATATAN/REKOMENDASI :

1. Badan Anggaran sangat mengapresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang selama 5 kali berturut-turut.
2. Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya hanya sebesar Rp. 353.094.781.382,53 atau 94,37 % dari anggaran, Untuk itu Badan Anggaran mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang supaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang sah melalui kajian-kajian potensi yang di dukung dengan basis data yang konkrit dan valid sesuai dengan regulasi yang ada.
3. Dalam hal belanja daerah realisasinya Rp. 1.991.790.018.142,71 atau 89,24 % dari anggaran, belum bisa optimal penyerapannya, hal ini terlihat masih ada proyek pekerjaan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan saat ini belum selesai, Ke depan Badan Anggaran mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk selalu memonitoring dan mengevaluasi kegiatan/proyek pekerjaan agar tidak terulang lagi..

V. PENUTUP

Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagai bahan Rapat Paripurna pada hari ini.

Rembang, 20 Juli 2023

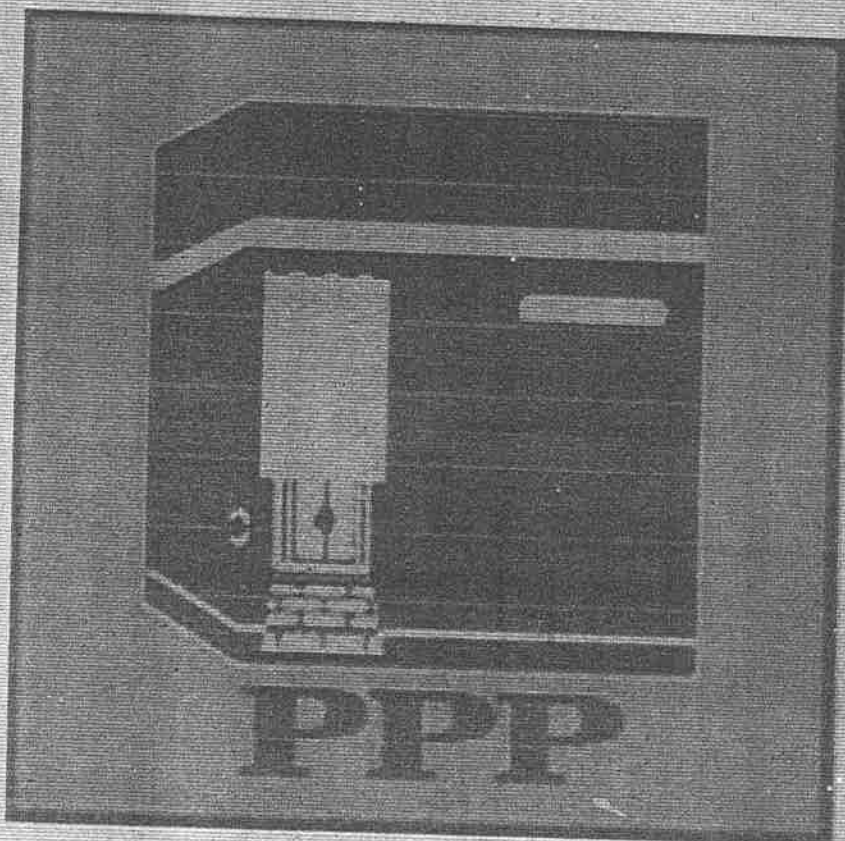
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG



SEKRETARIS

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO,S.IP

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

Hari : Kamis , 20 Juli 2023

Dibacakan oleh : H. ABDUL ROUF

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG , TAHUN 2022
DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
Hari : Kamis , 20 Juli 2023
Dibacakan oleh : H. ABDUL ROUF.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh.....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , Assholatu wassalamu a'laa Rosulillah , Wa a'la alihi Washohbihi wamawwalah..., Laa haula Walaa quwwata Illabillah..., Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Sdr. Forkopimda Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli , Asisten Sekretaris Daerah , Para Kepala OPD dan para Camat , dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .
- Sdr. Rekan-rekan Wartawan , dan semua hadirin yang dimulyakan ALLAH.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT , atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita , sehingga sampai kini , kita masih diberikan kesempatan hadir , dalam Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam , semoga selalu tercurahkan pada junjungan nabi besar kita , MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Pada kesempatan yang baik ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mengucapkan “ Selamat tahun Baru 1445 H “ Semoga di tahun yang baru ini , membawa kesuksesan kita bersama untuk membangun Rembang kedepan lebih baik.

Kami juga menyampaikan “ Selamat Menyongsong Hari Ulang Tahun Kabupaten rembang yang ke 282 “ , Dengan Tema Rembang Gemilang Untuk Rembang Berkelanjutan .

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2022 , dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyandang predikat Opini WTP yang ke lima kalinya , meskipun dari hasil pembahasan , masih banyak adanya catatan kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan , dengan diharapkan untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya , harus berhasil lebih baik lagi.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras , sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 ini , dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan . Mulai dari Penyampaian nota keuangan LPJ APBD Tahun Anggaran 2022 , oleh sdr. Bupati , dan juga jawaban pemandangan umum Fraksi-fraksi , juga oleh sdr. Bupati pada rapat Paripurna ke I , pada hari senin , tanggal 26 Juni 2023 yang lalu , Dan dilanjutkan Pembahasan Raperda LPJ tersebut , oleh Banggar bersama TAPD , sampai dengan Sinkronisasi antara Banggar bersama TAPD , yang berakhir sampai tanggal 18 Juli 2022.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati , serta sidang Dewan yang kami hormati,

Setelah mendengarkan dan mencermati serta menelaah , Laporan Banggar atas hasil Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan Silpa APBD Tahun 2022 , dimana pemasangan Silpa tersebut diprediksi oleh TAPD sebesar 171 Milyar sekian , ternyata dari hasil audit BPK , Silpa APBD tahun 2022 hanya sebesar 28 Milyar sekian , perbedaan besaran angka yang amat jauh ini , akan mengganggu dan menyulitkan pada APBD di tahun berikutnya. Maka kami mohon agar dalam perencanaan APBD kedepan diperhitungkan lebih matang , sehingga hal tersebut tidak perlu terulang.
2. Dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan peningkatan PAD dari sector retribusi TPI dan Retribusi hasil tambang , kami mohon agar Pemkab Rembang menugaskan bantuan personil dari Satpol PP, untuk pengawasan dan penertiban, agar lebih tertib dan aman.
3. Dalam rangka mendukung Program Bappeda, yaitu demi segera mewujudkan terlaksananya Aplikasi One Map Infratraktur terpadu , dimohon agar semua OPD mensupport kelengkapan data-data yang dibutuhkan oleh Bappeda.
4. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mohon dan mengusulkan kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk mempersiapkan penyusunan dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2023, dan KUA / PPAS APBD Induk 2024 , untuk segera ditindak lanjuti , dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati , menelaah dan mengevaluasi hasil pembahasan yang dilaporkan oleh Banggar , terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 secara keseluruhan , melalui pendapat akhir ini menyampaikan , dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI** ” RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2022 ini , untuk **DITETAPKAN MENJADI** “ PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2022.

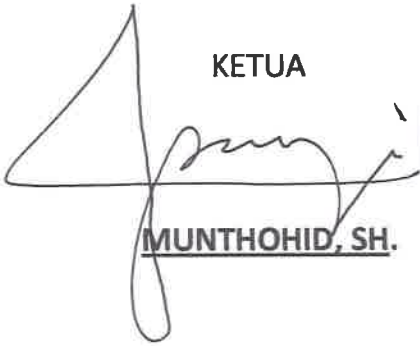
Trima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq wal Hidayah..,Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq.....,

Wassalamu a’laikum Wr..... Wb....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 20 Juli 2023

KETUA

MUNTHOHID, SH.



SEKRETARIS

H. SUNARDI. SPd. I.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Atas;

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan oleh :
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Kamis, 20 Juli 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD beserta Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang Kami Hormati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staff Ahli dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajarannya.

Yang Kami Hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang.

Yang Kami Hormati Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Rembang beserta Jajarannya.

Yang Kami Hormati para Camat sekabupaten Rembang.

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna penyampaian pendapat fraksi DPRD Kab. Rembang tentang persetujuan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2022 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun.

Tak lupa, Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Junjungan kita, Nabi Agung “Muhammad SAW” yang selalu kita tunggu safaatnya sampai yaumul kiamah, Amin Allah humma Amiin..

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan pendapat Fraksi PKB Kab.Rembang, Saya mewakili rekan-rekan Fraksi PKB mengucapkan **Selamat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1445 H**, Marilah Kita sambut tahun baru ini dengan penuh semangat dan Optimisme agar menjadi Pribadi yang lebih baik dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Berdasarkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pelaksanaan APBD TA 2022 pada tanggal 21 Juni 2023, Saya selaku juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) akan menyampaikan pendapat fraksi PKB atas Pertanggungjawaban APBD TA 2022 secara Objektif berdasarkan data dan hasil pembahasan serta kajian Badan Anggaran DPRD Kab. Rembang dengan TAPD beserta OPD Kab. Rembang.

Adapun catatan, masukan serta saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) adalah sebagai berikut;

1. Kami Fraksi PKB mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun kami juga prihatin karena berdasarkan LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 kita dapat menemukan adanya permasalahan-permasalahan pada APBD 2022 baik dari sisi strategi perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang disampaikan oleh Bupati, dalam hemat kami perencanaan APBD tahun 2022 belum dilakukan secara terukur dan akurat yang dapat kita lihat dari belum tercapainya target Pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan Transfer.

A. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp 353.094.781.382 (*Tiga ratus lima puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp 374.171.127.000 (*tiga ratus tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), dan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 menurun sebesar Rp 51.005.865.196 (*lima puluh satu milyar lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp 404.100.646.579. (*empat ratus empat milyar seratus juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*)

Dalam Hal ini kami mempertanyakan mengapa Pendapatan Asli Daerah TA 2022 mengalami Penurunan dibandingkan Realisasi TA 2021, dimana kami berpendapat bahwa Tahun 2022 pertumbuhan Ekonomi sudah normal dan membaik pasca Covid 19.

Saran dan Masukan;

1. Mohon kedepan Pemerintah Kabupaten lebih menghitung secara cermat terkait Target potensi Pendapatan Asli daerah yang diproyeksikan, terutama disektor Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dalam hal ini Target PAD mengalami kenaikan hampir 100% dari realiasi TA 2021, yang berakibat tidak tercapainya Target tersebut.
 2. Adanya Langkah-langkah antisipasi pemkab disektor PAD lain-lain yang sah dimana mengalami penurunan Rp. 51.005.865.196 (*lima puluh satu milyar lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) atau 12,62 % dari realisasi TA 2021, Sehingga di TA 2023 tidak mengalami penurunan Kembali.
- B. Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.526.359.954.903,- (*satu triliun lima ratus dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah*) terealisasi Rp. 1.485.289.385.870,- (*satu triliun empat ratus delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) (97,31%) terjadi selisih kurang Rp. 41.070.569.033,- (*empat puluh satu*

milyar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) (2,69%).

Mohon kedepan Pemkab Rembang lebih cermat dalam memproyeksikan Target Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar daerah mengingat peningkatan Pendapatan Tranfer hanya mengalami kenaikan 3,43 % dari Realisasi TA 2021, sehingga Target yang diproyeksikan tidak meleset terlalu jauh yang berakibat mengurangi belanja-belanja lainnya.

3. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dalam LRA TA 2022 menyajikan Silpa Sebesar Rp. 28.562.969.761,- (*dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*). Adapun silpa TA 2022 terdiri dari;

1. Silpa di Kas Daerah sebesar Rp. 15.236.071.421,- (*lima belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) antara lain Silpa DAK Fisik, DAK non Fisik, Bantuan Provinsi serta CSR dari Pihak ketiga PT Semen Indonesia Rembang.
2. Silpa di kas BLUD sebesar Rp. 13.234.645.367,- (*tiga belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*) dan Kas Bendahara BOS sebesar Rp 112.861.611,- (*seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah*)

Dalam hal ini Hampir semua Silpa TA 2022 baik di Kas Daerah, Kas BLUD dan Silpa di bendahara Bos sudah pasti parutukannya, sedangkan Proyeksi Silpa TA 2023 yaitu sebesar Rp 171 M. Hal ini akan sangat membebani Anggaran Belanja TA 2023 mengingat target silpa TA 2022 merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja TA 2023.

Hal ini kian diperparah dengan adanya utang belanja pada catatan Atas Laporan Keuangan BPK sebesar Rp. 41.988.079.667,- (*empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*). Nilai tersebut merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pada pihak ketiga atas kegiatan belanja TA 2022 dan kewajiban tahun-tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sampai tanggal 31 desember 2022.

Maka kami menduga, hampir bisa dipastikan akan ada banyak rencana-rencana belanja 2023 yang tidak terealisasi demi menutup kekurangan Target Silpa yang tidak tercapai serta kewajiban membayar Utang kepada Pihak ketiga.

4. Adanya target Silpa yang tidak tercapai, berdampak kekosongan kas di Kas daerah yang menyebabkan tersendatnya realisasi APBD TA 2023. Situasi dan kondisi ini tentu membutuhkan langkah-langkah dan solusi kongkrit dari Pemkab agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Kami sangat prihatin mendengarkan keluhan kesah pihak ketiga yang menjadi mitra Pemkab dalam mengerjakan proyek atau kegiatan APBD 2023, kegiatan atau proyeknya sudah dikerjakan berbulan-bulan tapi sampai saat ini belum terbayar. Begitu juga dengan masyarakat penerima bantuan yang sudah mengurus pencairan namun sampai saat ini belum ada kejelasan kapan bantuannya bisa dicairkan.

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,

Demikian Pendapat Fraksi PKB atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab. Rembang Tahun 2022 ini kami sampaikan. Maka dengan mengucapkan **“Bismillahirrohmannirrohim”** Kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **MENYETUJUI** Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai Perda

Pertanggungjawaban APBD TA 2022. Atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih

Akhirul kalam Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 20 Juli 2023
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG



Nasirudin, S.Si
Ketua



Ilyas
Sekretaris



**PENDAPAT FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua
Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang;
Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Staf Ahli Bupati Rembang;
Yth. Asisten I, II, dan III Sekda Rembang;
Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se-Kabupaten Rembang;
Yth. Camat se-Kabupaten Rembang;
Yth. Para Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian **“Pendapat Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022”** dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Kami telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Maka dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus mengambil langkah strategis dalam mengelola potensi-potensi PAD. Pengelolaan kekayaan dan aset daerah menjadi sangat penting, potensi PAD Kabupaten Rembang cukup banyak, akan tetapi belum terkelola dan diurus dengan maksimal. Mohon untuk dimaksimalkan.
2. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda atau tidak terealisasi di Tahun 2022, agar dilaksanakan kembali sebagai prioritas di tahun berikutnya.
3. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu Fraksi NasDem memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Rembang.
4. Kami menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Perda.

Demikian Pendapat Fraksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Juli 2023

**a.n. KETUA
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS FRAKSI**

The block contains a circular official stamp of the DPRD Rembang Fraksi Nasdem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name FRIDA IRIANI is printed in bold, underlined capital letters.

FRIDA IRIANI



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA II
DPRD KABUPATEN REMBANG
KAMIS, 20 JULI 2023**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang Terhormat, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Para Kabag di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Ka Dinas/Badan, Ka Kantor/Instansi dan Camat se- Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Para Kabag dan beserta jajarannya, Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Sebelumnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1445 H, semoga awal tahun ini menjadikan momen penting untuk kita introspeksi diri. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Aamiin..

Berikutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Tak lupa juga kami memberikan apresiasi yang besar kepada Pimpinan dan Anggota Banggar, TAPD, serta Tenaga Ahli yang telah bekerja keras dalam pendalaman, sinkronisasi dan penyusunan laporan atas pembahasan Raperda tersebut sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Terkait dengan hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan ingin memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

- Kami berharap, pemerintah Kabupaten Rembang dapat segera menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil audit dari BPK dengan baik. serta sehingga.
- Kami berharap, kedepannya Pemerintah Kabupaten lebih meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perbendaharaan dan perencanaan penyusunan serta pengelolaan APBD lebih optimal dalam penyerapannya guna meningkatkan serapan belanja daerah yang akuntabel, yang akhirnya berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian beberapa catatan dari kami, selanjutnya dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohiim**" kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat **Menerima dan Menyetujui** Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2022 ini, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan untuk kita semua. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT –HANURA
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022



FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
KAMIS, 20 Juli 2023
DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT –HANURA

ATAS

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

KAMIS, 20 JULI 2023

DIBACAKAN OLEH :

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagikita Semua.

Yang kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang Terhormat,

Saudara Sekertaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/ Bagian serta Camat Se Kabupaten Rembang.

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini perkenan kami menyampaikan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayahNya sehingga kita semua bisa menghadiri Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun

Saudara Bupati,Wakil Bupati, dan sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini kami Fraksi Demokrat – Hanura dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohchim Menerima dan Menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2022 menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD T.A 2022 dengan beberapa Catatan untuk di tindak lanjuti antara lain :

1. Dalam perencanaan APBD Tahun 2022 ini masih kurang cermat dan matangnya rencana belanja terutama belanja yang bersumber dari dana pinjaman daerah.
2. Dalam proses pengadaan tanah, Pemkab Rembang agak Sembrono yaitu Anggaran untuk perencanaan, FS, dan Appresal tanahnya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pembebasan lahannya. sehingga berakibat tidak bisa dilaksanakan atau hanya sebagian karena anggarannya kurang dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada terkait pengadaan tanah.
3. Kami berharap dalam carut marutnya Pelaksanaan kegiatan pembangunan atau rehab jalan yang terserap/dilaksanakan hanya 20% saja sehingga sangat di sayangkan. Dan kami berharap ini tidak terulang kembali di tahun – tahun yang akan mendatang.

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat – Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Juli 2023

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA



MUGIARTO S.T

SEKRETARIS



DUMADIYONO, S.H.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

**Rancangan Perda
Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang**

Hari Kamis, 20 Juli 2023

Juru Bicara: PUJI SANTOSO, S.P., M.H.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Staf Ahli Bupati Rembang
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi kali ini, perkenalkanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumil Akhir nanti.

Perkenalkanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445H yang jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Masehi. Tahun baru adalah kesempatan baru. Mari perbaiki diri untuk

ke depannya, mulailah dengan kebaikan, Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Mendengar penjelasan tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sdr. Bupati.

Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) sangat mengapresiasi atas segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab dalam meningkatkan laju pembangunan .

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan antara lain :

1. Mencermati hasil audit BPK atas Pelaksanaan APBD Tahun 2022, masih ditemukan banyak catatan dan kekurangan dan kelebihan pembayaran. Juga ada koreksi atas tata kelola kas daerah. Ini menandakan bahwa pelaksanaan masih butuh perbaikan ke depan. Terutama dalam hal perbaikan pengelolaan kas daerah agar benar-benar diadakan perbaikan signifikan.
2. Berbagai hal temuan audit BPK hendaknya segera untuk dilaksanakan dan dibayarkan agar tidak menimbulkan dampak yang justru merugikan, maka kami berharap agar Pemkab bersikap tegas atas semua temuan.

3. Ke depannya kami berharap agar Pemkab bisa lebih cermat dan teliti sehingga APBD yang menjadi representasi kerja pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Jadi tidak hanya berorientasi besaran serapan anggaran, tapi juga pada dampak dan perubahan terhadap masyarakat.
4. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera meminta kepada Pemkab Rembang melalui BPPKAD agar kedepan bisa melaksanakan Anggaran dan Menejemen Kas secara Optimal. Karena pada APBD Tahun 2022 kondisi yang ada yaitu defisit anggaran melebihi ambang batas, menejemen kas tidak optimal. Kedepan kita bisa lebih cermat dan hati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan APBD.
5. Berkaca pada kejadian tahun 2022 yang lalu bahwa banyak pekerjaan yang belum selesai sampai di akhir tahun. Hal tersebut menyisakan permasalahan yang berkepanjangan, baik itu pekerjaan fisik yang ada dilapangan, administrasi, denda keterlambatan, anggaran maupun pembayarannya. Kami meminta agar kedepan hal ini tidak terulang kembali, Pemerintah harus bisa melaksanakan semua pekerjaan selesai ditahun yang sama tanpa harus ada pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun. Untuk itu kami mendorong Pemerintah agar bisa melaksanakan pekerjaan fisik di Triwulan 2 maupun ke 3, dengan harapan apabila terjadi lagi ada pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan batas kontrak, maka bisa dilanjutkan dan diberi perpanjangan waktu ditahun yang sama tanpa harus melewati tahun yang akan datang. Untuk itu Pemerintah harus menyiapkan perencanaan fisik ditahun sebelumnya (T - 1)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Menutup Pendapat Akhir ini mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja menunaikan semua amanah kita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,

Sekretaris,


WIWIN WINARTO, S.H.




AGUS SUTRISNO



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA
PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022
Rembang, 20 Juli 2023**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Untuk Kita semua

- Ykh. -Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang ;
- Wakil Bupati Rembang
 - Rekan-Rekan Forkopimda Kabupaten
Rembang;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
 - Para Asisten Sekda, Kepala OPD dan
Kepala Bagian di lingkungan Setda
Kabupaten Rembang ;

- Para Ketua Partai Politik, Rekan-rekan Wartawan, LSM, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur ***Alhamdulillah***, atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka **“Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD berserta unsur pimpinan, dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah menunjukkan keseriusannya, mengedepankan sikap arif dan bijaksana dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah kita lalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hari ini telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semua tanggapan, apresiasi, kritik, saran, dan pendapat yang disampaikan masing-masing fraksi

maupun Komisi DPRD selama pembahasan akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan terhadap masyarakat. Pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran.

Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan DPRD akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terkait hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan memperbaikinya pada proses perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya.

Sedangkan hal yang sudah baik kami akan mempertahankan, bahkan akan meningkatkan lagi, untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang yaitu **“Terwujudnya Rembang Gemilang Tahun 2026”**

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakekatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas dan program yang sudah dikerjakan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan gambaran umum melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Daerah dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Forkopimda, Kepala OPD, pimpinan partai politik, wartawan, LSM, dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta buah karya dan hasil kerja keras kita bersama.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian Pendapat Akhir atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2022, yang telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Kabupaten Rembang.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS IV ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERDA RTRW TAHUN 2023 – 2043 KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA
Kamis 20 Juli 2023**

I. DASAR PEMBAHASAN PANSUS

1. Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubaha beberapakali terakhir dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka penjadwalan pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang pada tanggal 2 November 2020.
3. Surat Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda dan 1 (satu) Rancangan Awal Raperda ter tang RTRW Tahun 2020 – 2040 Kabupaten Rembang.
4. Surat Keputusan DPRD tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas RTRW Kabupaten Rembang.
5. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 Juli 2023 dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Rembang.

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1	H. GUNASIH, S.E.	Ketua
2	MUNTHOHID, S.H.	Wakil Ketua
3	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota
4	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota
5	ILYAS	Anggota
6	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.I.	Anggota
7	SAHNIGSIH, S.E.	Anggota
8	ADI PURWOTO	Anggota
9	JASMANI	Anggota
10	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota

Dengan tugas membahas Rancangan Awal Raperda tentang RTRW Kabupaten Rembang

II. PEMBAHASAN

Dalam membahas Ranperda RTRW, Pansus IV telah melaksanakan Rapat sebagai berikut :

a. Pelaksanaan rapat – rapat bersama OPD terkait dan pelaku usaha di Kabupaten Rembang :

1. Kamis Tanggal 5 November 2020
2. Jumat Tanggal 6 November 2020
3. Rabu Tanggal 11 November 2020
4. Jumat Tanggal 13 November 2020
5. Jumat Tanggal 26 Maret 2021
6. Jumat Tanggal 30 Mei 2021
7. Rabu Tanggal 16 Juni 2021
8. Selasa Tanggal 25 Januari 2022
9. Rabu Tanggal 26 Januari 2022
10. Jumat Tanggal 4 Februari 2022.
11. Selasa Tanggal 22 Februari 2022
12. Rabu Tanggal 28 Maret 2022
13. Kamis Tanggal 30 Juni 2022
14. Jumat Tanggal 8 Juli 2022
15. Selasa Tanggal 6 September 2022
16. Rabu Tanggal 9 November 2022
17. Kamis Tanggal 10 November 2022
18. Jumat Tanggal 6 Januari 2023
19. Rabu Tanggal 15 Februari 2023
20. Senin Tanggal 15 Mei 2023
21. Senin Tanggal 17 Juli 2023

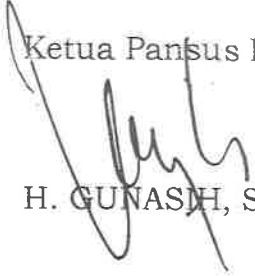
III. HASIL PEMBAHASAN

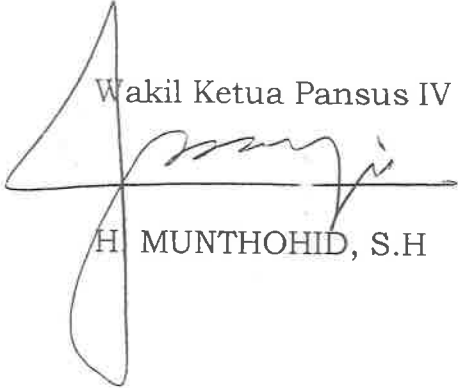
- a. Dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda, mulai dari Rancangan Awal sampai dengan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu sejak akhir tahun 2020 sampai dengan saat ini, Pansus telah melakukan penambahan, pengurangan ataupun pembenahan pada Rancangan Perda, dan dalam pelaksanaan pembahasan terdapat banyak sekali dinamika-dinamika pembahasan di berbagai sektor maupun kawasan.
- b. Pelaksanaan kunjungan lapangan di lokasi-lokasi tambang dan sepadan pantai di wilayah Kabupaten Rembang.
- c. Dalam kunjungan Lapangan terdapat realita bahwa penambang yang belum mendapatkan ijin tambang karena bersinggungan dengan Peta Resapan Air tapi tetap melakukan penambangan. Hal tersebut akan merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Untuk itu Pansus IV berinisiatif lahan yang sudah ditambang yang belum mendapatkan ijin tambang untuk bisa dilegalkan dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- d. Pelaksanaan audiensi dan asistensi terkait Kawasan Lindung Geologi di lokasi Cekungan Air Tanah Watu Putih Kabupaten Rembang di Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral Republik Indonesia Pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022.
- e. Luasan LP2B yang dari Dinas pertanian sebesar 37.000 ha untuk dapat dikurangi luasannya menjadi 32.000 Ha, dengan alasan hal tersebut dapat menyusahkan masyarakat karena lahannya sudah tidak bisa dialih fungsikan untuk kegunaan lain.
- f. Dalam Peta terdapat tumpang tindih antara kawasan Pertambangan, Kawasan LP2B dan Kawasan Industri sehingga perlu dibenahi dan dilakukan penataan kembali.
- g. Pasal 87 ayat (2) yang berbunyi Kawasan Resapan air digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dihapus dengan alasan Peta Kawasan Resapan air tersebut tidak ada data pendukungnya, dan dirasa Peta tersebut tidak komprehensif atau tiba-tiba muncul tanpa ada data pendukung kajian.
- h. Pada Pasal 87 ayat (2) yang berbunyi Kawasan Resapan air digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini **diubah** sehingga Pasal 87 ayat (2) berbunyi Delineasi Kawasan Resapan Air menyesuaikan ketentuan berlaku dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Peta Kawasan Resapan Air Tanah dalam Lampiran **dihapus** karena tidak diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan juga tidak ada data penunjang atas terbitnya Peta Kawasan Resapan Air tersebut.

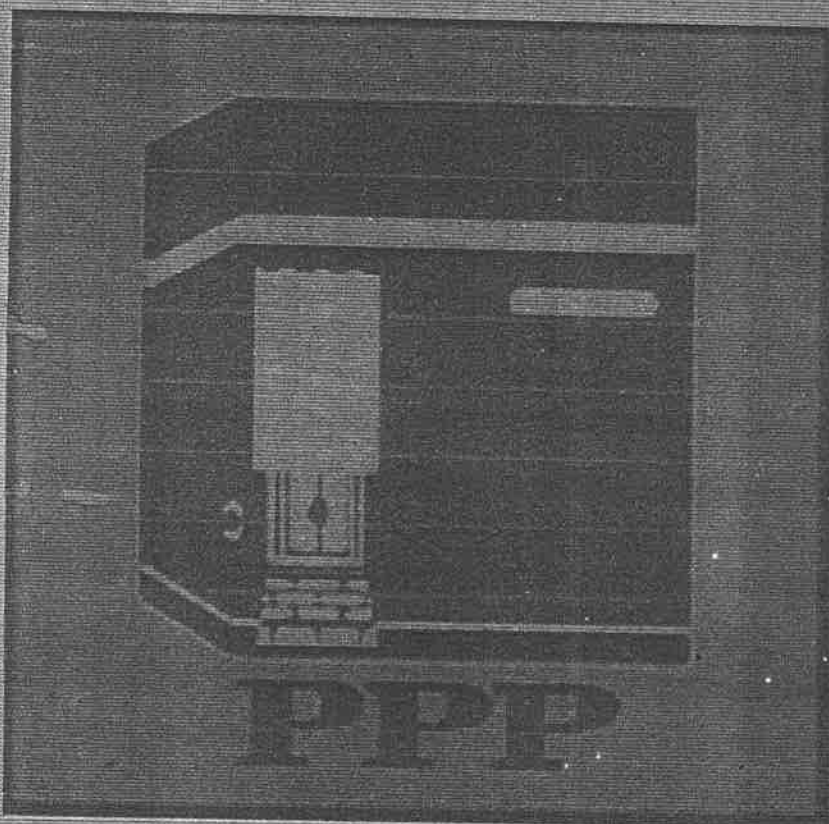
IV. PENUTUP

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan dalam membahas Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang.

Ketua Pansus IV

H. GUNASIH, S.E.

Wakil Ketua Pansus IV

H. MUNTHOHID, S.H

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA RENCANA TATA TUANG WILAYAH (RTRW) TH. 2023-2043
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

Hari : Kamis , 20 Juli 2023

Dibacakan oleh : SUMARDI

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TH.2023-2043
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023
DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
Hari : Kamis , 20 Juli 2023
Dibacakan oleh : SUMARDI .

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh.....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , Assholatu wassalamu a'laa Rosulillah , Wa a'la alihi Washohbihi wamawwalah..., Laa haula Walaa quwwata Illabillah..., Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli , Asisten Sekretaris Daerah , Para Kepala OPD dan para Camat , dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf , Dan ...
- Sdr. Rekan-rekan Wartawan , dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT , atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita , sehingga sampai kini , kita masih diberikan kesempatan hadir , dalam Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam , semoga selalu tercurahkan pada junjungan nabi besar kita , MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Pada kesempatan yang baik ini , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan “ Selamat Tahun Baru 1445 H “ semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberikan Kesuksesan , untuk membangun Rembang yang lebih baik lagi .

Dan kami juga menyampaikan “ Selamat menyongsong HUT Kabupaten Rembang yang ke 282 “ pada Tanggal 27 Juli 2023 , dengan tema Rembang Gemilang Untuk Rembang Berkelanjutan.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2022 , dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyandang predikat Opini WTP yang ke lima kalinya , meskipun masih ada beberapa catatan kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan , kita diharapkan untuk kedepan harus berhasil lebih baik lagi.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan Propemperda dan Bapemperda serta Pansus , yang telah bekerja keras , sehingga penyusunan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Kabupaten Rembang ini , dapat selesai dengan waktu yang cukup panjang , yakni kurang lebih sampai 32 bulan , Mulai dari Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , Pembahasan Pansus bersama para pihak terkait , sampai dengan hasil sinkronisasi.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati , serta sidang Dewan yang kami hormati,

Setelah mendengarkan dan mencermati serta menelaah , Laporan Pansus atas hasil Pembahasan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043 Kabupaten Rembang , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan beberapa catatan dari hasil pembahasan, sebagai berikut :

- 1 Dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat , baik warga Rembang ataupun dari pihak lain , yang berkepentingan Usaha di Rembang , dan berkaitan dengan Perda RTRW ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan mohon , agar setelah persetujuan penetapan dan diberlakukanya Perda RTRW ini , segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perkadanya , sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

- 2 Dengan sudah terbitnya Perda RTRW Kabupaten Rembang yang baru ini , kami berharap pemanfaatan seluruh lahan di Kabupaten Rembang , akan tertata dan lebih tertib , sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan yang telah ditetapkan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati , menelaah dan mengevaluasi hasil pembahasan yang dilaporkan oleh Pansus , terhadap RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Tahun 2023-2043 Kabupaten Rembang secara keseluruhan , melalui pendapat akhir ini menyampaikan , dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI** ” RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Tahun 2023-2043 Kabupaten Rembang ini , untuk **DITETAPKAN MENJADI** “ PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Tahun 2023-2043 Kabupaten Rembang .

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Tentang hasil Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043 Kabupaten rembang .

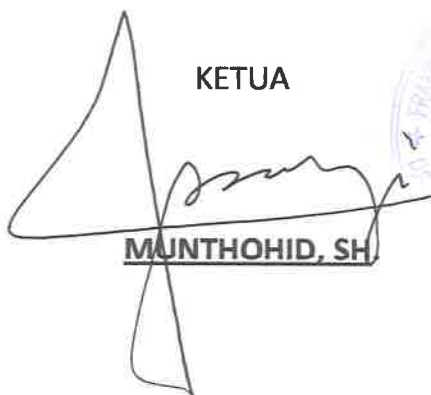
Trima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq wal Hidayah..,Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq....,

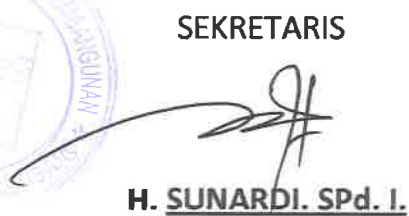
Wassalamu a’laikum Wr..... Wb....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 20 Juli 2023

KETUA

MUNTHOHID, SH.



SEKRETARIS

H. SUNARDI. SPd. I.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rembang
Tahun 2023-2043

Disampaikan oleh :

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Kamis, 20 Juli 2023

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat FPKB ini perkenankanlah kami menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita.

Selanjutnya Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) juga mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1445 H dan dengan hadirnya tahun baru ini semoga menjadi motivasi bagi kita untuk menumbuhkan semangat baru untuk lebih baik kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Setelah FPKB mendengarkan laporan pansus IV atas hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rembang Tahun 2023-2043, pada prinsipnya FPKB bisa memahami laporan tersebut.

Selain itu, mengingat pentingnya perda RTRW sebagai salah satu pedoman dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemberian perizinan dan bahwa pembahasan Raperda ini sudah dilakukan secara sungguh-sungguh, komprehensif, melibatkan semua pihak dan memperhatikan semua aspek yang terkait dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada baik dari sisi tahapan pembahasan maupun kontennya. Hadirnya Perda RTRW ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh para investor, pelaku usaha dan seluruh masyarakat Kab. Rembang.

Maka, berdasarkan beberapa hal ini FPKB dapat **menerima dan menyetujui** Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rembang Tahun 2023-2043 untuk selanjutnya **ditetapkan** dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Demikian pendapat FPKB ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Akhirul Kalam Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 20 Juli 2023
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG



Nasirudin, S.Si
Ketua



Ilyas
Sekretaris



**Partai
NasDem**
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043**



FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Staf Ahli Bupati Rembang;

Yth. Asisten I, II, dan III Sekda Rembang;

Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se-Kabupaten Rembang;

Yth. Camat se-Kabupaten Rembang;

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian **“Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 - 2043”** dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043 sebagai berikut :

1. Kami mendukung Raperda Kabupaten Rembang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043 untuk disahkan menjadi Perda karena hal ini mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
2. Setelah Raperda disahkan menjadi Perda, kami mengajak kepada semua pihak untuk melaksanakan Perda ini dengan baik.
3. Kami **menerima dan menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043 untuk disahkan menjadi Perda.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Juli 2023

**a.n. KETUA
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS FRAKSI**

The image shows a circular official stamp of the Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Rembang. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name FRIDA IRIANI is printed in bold, uppercase letters.

FRIDA IRIANI



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan Oleh :

ADI PURWOTO

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA II
DPRD KABUPATEN REMBANG
KAMIS, 20 JULI 2023**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 – 2043
KABUPATEN REMBANG

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Ka Dinas/Badan , Ka Kantor/Instansi dan Camat se- Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelumnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1445 H, semoga awal tahun ini menjadikan momen penting untuk kita koreksi diri. Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Aamiin..

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Kabupaten Rembang.

Kami Fraksi PDI Perjuangan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota panitia khusus IV yang telah meluangkan waktu nya dalam melakukan pembahasan mendalam mengenai raperda tersebut, sehingga raperda tersebut dapat terselesaikan.

Menanggapi rancangan peraturan daerah tersebut, kami fraksi PDI Perjuangan ingin memberikan beberapa catatan :

- Yang Pertama, pemerintah Kabupaten segera melakukan kajian-kajian teknis terkait kawasan resapan air tanah yang saat ini masih belum ada, sehingga kawasan resapan air tersebut dikemudian hari tidak dialihfungsikan.
- Yang Kedua, mengenai kawasan LP2B yang sangat luas maka pemerintah kabupaten perlu merencanakan pembangunan sarana-sarana pendukung di kawasan LP2B guna mendukung peningkatkan produktifitas pertanian.
- Yang terakhir, kami berharap pemerintah kabupaten dapat terus konsisten melaksanakan rencana tata ruang wilayah yang baik dan terstruktur demi mewujudkan Kabupaten Rembang yang berdaya saing.

selanjutnya dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohiim**" kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan ***Menerima dan Menyetujui*** Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 -2043 Kabupaten Rembang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

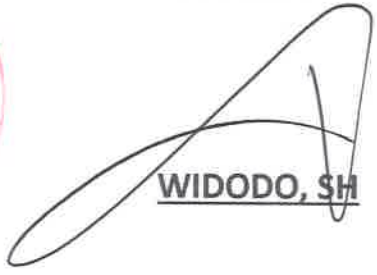
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

JASMANI



Sekretaris


WIDODO, SH

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT –HANURA
ATAS
RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
TAHUN 2023 - 2043



FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
KAMIS, 20 Juli 2023
DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT –HANURA
ATAS
RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
TAHUN 2023 - 2043
KAMIS, 20 JULI 2023
DIBACAKAN OLEH :**

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita Semua.

Yang kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang Terhormat,

Saudara Sekertaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala

Badan/Dinas/Instansi/Kantor/ Bagian serta Camat Se- Kabupaten Rembang.

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini perkenan kami menyampaikan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayahNya sehingga kita semua bisa menghadiri Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun

Saudara Bupati,Wakil Bupati, dan sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini kami Fraksi Demokrat – Hanura mengapresiasi pelaksanaan pembahasan Raperda RTRW ini selama 2 tahun lebih sehingga kami berharap Perda ini Benar – benar bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohhim Kami Fraksi Demokrat - Hanura Menerima dan menyetujui Raperda RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) menjadi Perda RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) sesuai dengan hasil dari pembahasan Pansus.

Kami Menyampaikan Beberapa Harapan dengan penetapan Perda ini antara lain

1. Kami fraksi demokrat – hanura berharap dengan di sahkan Perda RTRW ini dapat mengakomodir semua kepentingan baik itu petani, nelayan, pengusaha, lingkungan masyarakat terutama juga alam lingkungan sekitar Rembang yang harus dijaga dan dilestarikan.
2. dengan pengesahan Perda RTRW ini diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan lingkungan yang lestari.
3. Kami Fraksi Demokrat – Hanura berharap dengan ditetapkan Perda ini Pemerintah Daerah harus tegas dalam menegakkan sesuai dengan isi Perda ini.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Demokrat – Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Juli 2023

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA



MUGIARTO S.T



SEKRETARIS

DUMADIYONO, S.H.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

**PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERDA RTRW 2023 - 2043
&
PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang**

**Hari Kamis, 20 Juli 2023
Juru Bicara: **RABIS SWABIHANTORO****

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Staf Ahli Bupati Rembang
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumul Akhir nanti.

Perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445H yang jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Masehi kemaren. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 H. Mari menyongsong tahun baru hijriah dengan semangat ketakwaan yang

baru. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi kita dalam perjalanan untuk mencapai rida-Nya

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Mendengar penjelasan tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disampaikan oleh Pansus RTRW.

Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) sangat mengapresiasi atas segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Pansus RTRW dan Pemkab dalam menata wilayah Kabupaten Rembang .

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan suatu keharusan, karena berpengaruh terhadap pembangunan dan investasi di daerah.

Mengingat pemerintah Kabupaten Rembang belum mengeluarkan Perda RTRW baru semenjak tahun 2011. Maka hal ini bisa menjadi potensi bottleneck pembangunan, karena belum ada ketetapan hukum. Yang dibutuhkan investor adalah kepastian hukum, apakah kalau mereka bangun disini tidak akan digusur. Investor sekarang tidak mau bangun dulu selesaikan belakangan, mereka lebih memilih tidak membangun.

Oleh karenanya kehadiran perda RT RW ini sdh menjadi regulasi yg sangat ditunggu2 utk keberlanjutan pembangunan rembang kedepan.

Selanjutnya kami Fraksi Karya Indonesia Sejahtera memberikan pendapat sebagai berikut :

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan turunannya, terhadap RTRW, DPRD diantaranya berperan strategis dalam penyepakatan substansi rancangan peraturan daerah sebelum diajukan ke Menteri ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan substansi.

Setelah penetapan Perda RTRW hari ini, kami berharap Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan aturan Perda RTRW ini dalam Proses kegiatan dan pembangunan Daerah. Pemerintah juga harus memperhatikan aspek-aspek yang termuat didalamnya yaitu pembangunan Daerah, kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, investasi daerah / dunia usaha dan kearifan lokal. Selain itu juga diperhatikan persoalan-persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan diantaranya adanya realita penambangan yang belum ada ijin karena lokasi tambang bersinggungan dengan peta resapan air, tetapi para penambang tetap melakukan penambangan. Berikutnya adanya klaim luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang Dari Pertanian selalu 37.000 ha, sementara potensi yang ada di Rembang cuma 32.000 ha, karena hal ini akan problem kedepan. Selain itu adanya tumpang tindih antara kawasan LP2B, kawasan tambang dengan kawasan industri sehingga perlu dibenahi dan dilakukan penataan kembali oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Perda RTRW ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, hal ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, sebagai dasar

lokasi investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. RTRW sebagai pedoman untuk menyusun rencana tata ruang kawasan strategis sebuah daerah serta sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan, sehingga setelah penetapan Perda RTRW ini kami meminta kepada Bupati sebagai kepala daerah untuk bisa menindaklanjuti peraturan turunannya yaitu RDTRK yang ada dimasing-masing kecamatan, agar lebih detail tertata.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi Karya Indonesia Sejahtera Menyetujui Raperda RTRW 2023 – 2043 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Menutup Pendapat Akhir ini mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja menunaikan semua amanah kita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,


WIWIN WINARTO, S.H.

Sekretaris,


AGUS SUTRISNO



BUPATI REMBANG

**PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023-2043
DALAM RAPAT PARIPURNA II DPRD
Rembang, 20 Juli 2023**

***Assalamualaikum warahmatullahi
wabarokatuh.***

Yang kami hormati,

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna DPRD.

Dengan mengucapkan syukur ***Alhamdulillah***, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043, telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang

diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Oleh karena itu, dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat menghargai semangat dan kerja keras DPRD, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tersebut telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Rancangan Perda Kabupaten Rembang tentang RTRW Tahun 2023-2043 meliputi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Tahapan penyusunan Perda Kabupaten Rembang tentang RTRW Tahun 2023-2043 melalui proses yang cukup panjang:

- mulai dari Peninjauan kembali Revisi RTRW Kabupaten Rembang di Tahun 2016;
- penyesuaian draft Ranperda dengan dinamika peraturan-peraturan terbaru di tahun 2018 sampai 2021; serta
- proses untuk mendapatkan Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN RI pada awal tahun 2021 sampai akhir Tahun 2022

Setelah mendapatkan Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN RI, ditindaklanjuti dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Tentang Pengesahan Raperda Tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 yang dilaksanakan pada hari ini.

Selanjutnya, masih perlu beberapa tahapan kembali sampai ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Rembang, yaitu:

- Menyampaikan Raperda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi dan fasilitasi konsultasi di

Kemendagri untuk mendapatkan Nomor Registrasi; serta

- Penetapan Raperda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 oleh Bupati Rembang.

Perda RTRW Kabupaten Rembang ini nantinya mempunyai nilai yang sangat strategis, karena akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mana RDTR akan terintegrasi dengan OSS yang mempercepat proses perizinan dan menarik investor ke Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi semua pihak dalam penyusunan RTRW Kabupaten Rembang.

Selanjutnya dengan ini Pemerintah Daerah setuju atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna II ini.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Juli 2023;
2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Juli 2023;
3. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Juli 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

Nama Jabatan	Paraf
Sekwen	nf.
Kabang	
Kasubag	R



SUPADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023-2043

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 telah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan / atau Hak Atas tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

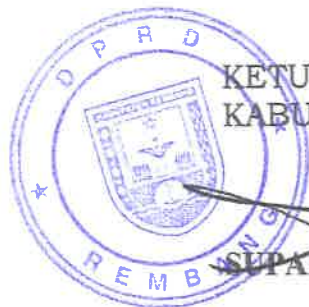
Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2023-2043.
- KEDUA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Bupati Rembang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Semua biaya akibat diterbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 20 Juli 2023



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SUPADI

Nama Jabatan	Pada
Sekwan	nf.
Kabdag	R
Kasubbag	R